

**PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA MEDAN SETELAH BERLANGSUNGNYA
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**

**AHMAD FAISAL NASUTION
92213021939**

**Program studi:
HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

PENGESAHAN

Tesis berjudul "PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN SETELAH BERLANGSUNGNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974, AHMAD FAISAL NASUTION 92213021939 Program Studi Hukum Islam

telah di Munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Pascasarjana UIN - Sumatera Utara Medan tanggal, Februari 2016

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam pada Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN - Sumatera Utara Medan.

	Medan, Februari 2016
	Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
	Program Pascasarjana UIN - Sumatera Utara Medan
Ketua	Sekretaris

(Dr. Jamil, MA)

NIP. 19580815 198503 1 007

(Dr. Hafsah)

NIP. 19620411 198902 1 001

1. **(Dr, Jamil, MA**

NIP. 19580815 198503 1 007

2. **(Hafsah)**

NIP. 19620411 198902 1 001

3. **(Prof. Dr. Pagarhsb, MA)**

NIP. 19640209 198903 1 003

4. **(Prof.Dr. Ahmad Qorib, MA)**

NIP. 19670526 199603 1 002

Mengetahui:

Direktur PPs UIN - Sumatera Utara

(Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA)

NIP. 19580815 198503 1 007

KATA PENGANTAR



Buat langkah yang pertama puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis sampaikan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing dan mengangkat derajat umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Setelah melalui perjalanan panjang dalam mengerjakan penelitian, **"PELAKSANAAN ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MEDAN SETELAH BERLANGSUNGNYA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**

", ini adalah sebuah karya yang paling berharga dan tidak akan pernah terlupakan bagi kehidupan penulis sendiri.

Terwujudnya tesis ini juga merupakan usaha maksimal yang telah penulis lakukan, dan penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini banyak mengalami hambatan/kendala, walaupun demikian dapat diatasi berkat bantuan dan pertolongan Allah Swt. dan juga bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang seutuhnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA, menjabat sebagai Rektor IAIN Sumatera Utara, dimana telah menjadi peran penentu dalam memberikan sumbangsih pemikiran maupun kinerja yang semaksimal mungkin dalam memajukan lembaga yang sangat penulis cintai ini.
2. Bapak Prof. Dr. RAMLI ABDUL WAHID, MA, menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Abdul Mukti, MA, menjabat sebagai Asisten Direktur I, juga sebagai dosen di dalam perkuliahan yang telah

memberikan motivasi yang dapat menumbuhkan keyakinan dan kekuatan mental penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan sampai kepada penyelesaian tesis ini, sehingga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA, selaku pembimbing I yang dengan kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberi arahan, saran-saran dan motivasi kepada penulis dari segi isi selama dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Prof. Pagar, M.AG, selaku pembimbing II yang dengan kesabaran, telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberi arahan, saran-saran dan motivasi kepada penulis dari segi metodologi selama dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Pascasarjana, khususnya yang memberikan perkuliahan pada program S2 PAI, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan ini, Bapak dan Ibu yang bertugas di bidang Administrasi Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Perpustakaan, baik di kampus Jln. Helvetia Medan, kampus Jln. Sutomo Ujung Medan, maupun di kampus Jln. Pancing Medan.
6. Bapak Drs. Husaini, selaku kepala MTsN Kota Langsa beserta dewan guru dan juga tenaga administrasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan bagi penulis baik dalam bentuk moril maupun kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sehingga dapat memperlancar dalam perjalanan proses perkuliahan bagi penulis.
7. Keluarga sebagai pemicu semangat, kegairahan, serta motivasi yang sangat berharga buat hidup penulis yaitu: kepada Ibunda Hj. Khairiah Hasan, Ayahanda Drs. H. Ibrahim Daud, keempat kakak penulis yaitu: Fatimah Ibda, S.Ag, M.Si, Zakiah Ibda, S.K.M., Khalidah Ibda, S.Ag, dan Fauziah Ibda, S.K.M., dan tidak lupa pula kepada seluruh keponakan yaitu: Izzah Farahiya, Nisa Hayatun Nufus, Ahmad Nabil Al-Hafiz, Najla Khairani, Muhammad Farhan, Getfira Attajani, Haura Fatin, Khaisia 'Ifaturrahmi, Nayla Mufhida, Marsya Nisa Puri, Muhammad Furqan Aulia,

dan Muhammad Abid Busra Abdul Karim. Mereka ibunda, ayahanda, dan beserta kakak penulis semua inilah yang selalu memberikan semangat dan dorongan yang sangat berarti dalam perjalanan perkuliahan penulis sampai kepada tahap penyelesaian perkuliahan serta penyelesaian tesis ini.

8. Seluruh anggota Pemuda dan Remaja Masjid Baiturrahim Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa dan rekan-rekan Program Studi hukum Islam Islam, dimana kelompok penulis berada, telah memberikan banyak bantuan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kepada semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan bagi penulis sehingga sukses dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Medan, 2015

Penulis,

Ahmad Faisal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Śa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : zukira

yazhabu : يذهب

suila : سئل

kaifa : كيف

hauila : هول

c. Maddah

Maddah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Dhammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : رما

qīla : قيل

yaqūlu : يقول

d. Ta Marbu'ah

Transliterasi untuk *ta marbu'ah* ada dua:

1) *ta marbu'ah* hidup

Ta marbu'ah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbu'ah* mati

Ta marbu'ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbu'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl : روضة الاطفال

al-Madīnatul al-munawwarah : المدينة المنورة

ṭalḥah : طلحة

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* itu tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

rabbanā : ربنا

nazzala : نزل

al-birr : البر

al-ḥajj : الحج

nu`ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu	: الرجل
as-sayyidatu	: السيدة
asy-syamsu	: الشمس
al-qalamu	: القلم
al-badī`u	: البديع
al-jalālu	: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khuzūna : تأخذون

an-nau' : النوء

syai'un : شيء

inna : ان

umirtu : امرت

akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahua khai ar-rāziqīn : وان الله لهو خير الرازقين

Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : وان الله لهو خير الرازقين

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna : فاو فوا الكيل والميزان

Fa auful-kaila wal-mīzāna : فاو فوا الكيل والميزان

Ibrāhim al-Khalīl : ابرا هيم الخليل

Ibrāhimul-Khalīl : ابرا هيم الخليل

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallāzî bi bakkata mubarakan
- Syahru Ramadan al-lazî unzila fihi al-Qur'ānu
- Syahru ramadanal-lazî unzila fihil Qur'ānu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubîn
- Wa laqad ra'āhu bil ufuqil-mubîn
- Alḥamdu lillāhi rabbil-'ālamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamā'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

k. Singkatan

as = 'alaih as-salam

h.	=	halaman
H.	=	tahun hijriyah
M.	=	tahun masehi
Q.S	=	Alqur'an surat
ra.	=	radhiallah 'anhu
saw.	=	salla Allah 'alaihi wa sallam
swt.	=	subhanahu wa ta 'ala
S.	=	surah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tahun
t.t.p	=	tanpa tempat penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Landasan teoritis.....	8
G. Kajian terdahulu.....	9
H. Metodologi penelitian.....	17
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Nikah	22
B. Pencatat perkawinan.....	28
1.1.	86
C. Kajian Terdahulu	95
D. Kerangka Pikir	97
E. Hipotesis	100
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	101
B. Metode Penelitian	101
C. Populasi dan Sampel	102
D. Definisi Operasional Variabel	106
E. Instrumen Pengumpulan Data	108
F. Uji Coba Instrumen	109
G. Hasil Uji Coba Instrument	110
H. Teknik Analisis Data	114
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	117
B. Uji Persyaratan Analisis	132
C. Pengujian Hipotesis	136
D. Pembahasan	141

E. Keterbatasan Penelitian	152
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	157
B. Saran-Saran	157
C. Implikasi Hasil Penelitian	158
 DAFTAR PUSTAKA	160
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	165
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan tuhan yang maha esa yang diberikan berupa akal dan fikiran belum efisien, demokratis, berkeadilan, serta partisipatif. Hal ini terjadi sebagai akibat otonomi dan profesional pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang belum sepenuhnya terwujud.

Sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diberlakukan, terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan dari yang bersipat sentralistik kepada desentralistik. Ini tentu memberi harapan baru bagi daerah dan satuan pendidikan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang optimal dan bermutu pada masyarakat.

Harapan ini yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana mengembalikan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat yang hilang akibat pengelolaan pendidikan yang birokratis tersebut, ini penting karena sejak berlakunya Inpres No. 10 Tahun 1973 secara praktis dan tanggung jawab pendidikan, terutama penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjadi beban pemerintah pusat, sehingga peran serta dan partisipasi masyarakat hanya sebatas pembiayaan pendidikan. Padahal banyak yang dapat dilakukan masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah.

Usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan sebuah fenomena untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik berupa pengelolaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, mengkoordinasi usaha, maupun kepemimpinan secara umum.

Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah dan Komite Sekolah. Kepala sekolah dan guru bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, atau keluarga peserta didik. Eksistensi pemerintah dan masyarakat sama pentingnya, meskipun pengalaman menunjukkan bahwa bertolak dari keterbatasan sumber daya pendidikan selama ini masyarakat memang sudah dilibatkan. Tetapi keterlibatan mereka terbatas pada memenuhi iuran BP3, kurang dilibatkan bagaimana pencapaian kurikulum dan pelayanan belajar yang bermutu. Di bawah sistem desentralisasi yaitu implementasi kebijakan otonomi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat, manajemen sekolah di arahkan untuk memberdayakan sekolah. Tujuan pokok desentralisasi pendidikan khususnya pada tingkat sekolah mengerahkan dan memberdayakan orang tua untuk bekerja sama yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dapat ditegaskan bahwa, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Nama dan ruang lingkup kewenangan wadah ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan seperti Komite Sekolah, Dewan Sekolah, Komite Pendidikan,

Komite Pendidikan Luar Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah. Atau nama lain sesuai dengan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sekolah dengan fokus pemenuhan mutu yang kompetitif.

Peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Aspek penting dari peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat dan mengetahui arti dan pentingnya keberadaan sekolah bagi anak-anaknya.¹

Pembentukan Komite Sekolah yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community-based management*) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah dituangkan dalam Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite Sekolah/masyarakat.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dukungan dan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan

¹ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 245.

memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah mengubah pendekatan pengelolaan pendidikan ke arah apa yang disebut *school governance*, di mana masyarakat sebagai stakeholder pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan dan merupakan pelengkap dari pengaturan sekolah yang telah ada yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholder* akan tersebar kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya di tangan aparat pemerintah pusat. Salah satu model pengelolaan pendidikan yang sedang digagas Departemen Pendidikan Nasional adalah apa yang disebut manajemen berbasis sekolah, yang memberi otonom kepada kemandirian sekolah. Keberhasilan dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota.²

Selama pembentukan MBS, Komite Sekolah telah menjalankan berbagai peran dan fungsinya meskipun belum begitu optimal. Situasi ini berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa tidak jarang Komite Sekolah hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hanya pada hal-hal tertentu saja misalnya realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah itu tidak ada lagi wujud keterlibatannya, terjadinya komplik antara pengurus Komite Sekolah dengan pihak sekolah, vakumnya Komite Sekolah dan berbagai persoalan lainnya.

Sesungguhnya kehadiran Komite Sekolah sebagai bagian dari sistem persekolahan, memberi peluang yang signifikan bagi peningkatan mutu manajerial sekolah. Komite Sekolah memiliki peran, fungsi dan tujuan yang sesuai dengan pencapaian tujuan sekolah yaitu meningkatkan proses mutu

² Warul Walidin AK, *Pencerahan Jurnal Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh, 2004), h. 2.

pendidikan dan pembelajaran sehingga memungkinkan peserta tumbuh dan berkembang untuk dapat menyesuaikan diri dengan potensi yang dimilikinya.

Jika ditelaah peran, fungsi dan tujuan Komite Sekolah, dapat dikatakan adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Kinerja sekolah yang dimaksud di sini adalah, hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi sekolah secara menyeluruh, yaitu bagaimana setiap sekolah dapat melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan melibatkan seluruh personil sekolah sehingga proses pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan berlangsung sebagaimana mestinya. Kinerja sekolah sebagaimana diketahui, terkait erat dengan bagaimana sebuah persekolahan mampu menyelenggarakan sistem persekolahan.

Upaya untuk melaksanakan manajemen Madrasah Aliyah tersebut sebagai salah satu bentuk kinerja dilingkungan sekolah, tidaklah menjadi tanggung jawab sekolah itu saja, tetapi ia dapat melaksanakannya bersama-sama dengan masyarakat, karena masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah memiliki kewajiban membantunya sebagai bentuk wujud kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu Madrasah. Dengan demikian perlu adanya bantuan yang bersifat kongkrit dari Komite Madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan.

Bantuan yang bersifat kongkrit dari Komite Sekolah dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Aliyah akan muncul manakala Madrasah mampu melakukan pemberdayaan Komite Sekolah.

Secara sederhana pemberdayaan dalam ruang lingkup manajemen dapat diartikan sebagai cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari Komite Sekolah. Pemberdayaan dimaksudkan sebagai keterlibatan Komite Sekolah untuk bersama-sama mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon.

Pada sisi lain pemberdayaan Komite Sekolah juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mendudukan kembali tujuan secara profesional, peran dan fungsi Komite Sekolah sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja kependidikan. Di samping menghilangkan kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memposisikan Komite Sekolah dalam sistem pendidikan, menjadikan dasar utama mengapa penelitian ini memfokuskan telaah kepada Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di lingkungan persekolahan.

Telaah dan penelusuran ini dilakukan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon dianggap representatif untuk mengetahui bagaimana melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui wadah Komite Sekolah. Maka yang diharapkan pihak terkait terutama kepala Dinas pendidikan dan pengajaran Kabupaten/kota Takengon Aceh Tengah memprioritaskan program-program pelatihan terutama dalam kaitan dengan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang tugas, peran dan tanggung jawab Komite Sekolah guna pencapaian tujuan peningkatan kinerja Komite Sekolah sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada masa yang akan datang.

Apalagi sebagai sekolah yang berstatus negeri maupun swasta, maka sekolah ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Berdasarkan pemikiran yang telah disebutkan di atas, peneliti merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan Komite Sekolah dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah Nanggroe Aceh Darussalam”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan judul penelitian dan sesuai dengan latar belakang masalah maka dapat penulis rumuskan dalam beberapa pertanyaan tentang Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Komite Sekolah menetapkan kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Takengon Aceh Tengah.
2. Bagaimana pelaksanaan tugas Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.
3. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi Komite Sekolah dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.

C. Batasan Istilah

Menghindari kemungkinan terjadinya pemahaman atau penafsiran yang tidak sesuai dengan makna yang peneliti maksudkan, maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini.

1. Pelaksaan yang berarti proses atau cara. Seseorang atau kelompok melaksanakan atau menjalankan kepanitiaan atau organisasi dalam membentuk rancangan, keputusan yang telah ditentukan bersama.³
2. Komite Sekolah dalam kaitan ini adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan perasarana serta pengawasan transparansi dari setiap bentuk kegiatan pendidikan baik di tingkat satuan pendidikan, pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 627.

Tengah. Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerjasama satu sama lainnya.

3. Peningkatan, langkah-langkah dan upaya sekolah menggalang potensi kerja secara praktis, efisiensi dan produktif untuk mewujudkan mutu pendidikan sesuai dengan yang diharapkan.
4. Mutu Pendidikan, kepandaian kecerdasan dan kualitas⁴ Meningkatkan mengembangkan peran siswa dalam pembelajaran dengan mendayagunakan kemampuan yang ada pada diri siswa. Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Peningkatan mutu pendidikan sangat terkait dengan relevansi pendidikan dan penilaian berdasarkan kondisi aktual mutu pendidikan.
5. Madrasah berasal dari kata darosa-yadrusu artinya tempat belajar/mengaji ilmu pengetahuan. Dalam judul penelitian ini berarti sekolah yang berciri khas Islam atau Lembaga pendidikan Islam yang terdiri dari kepala sekolah, tenaga pengajar, siswa, staf kepegawaian dan birokrasi pendidikan, Komite Sekolah, adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang tujuan pendidikan merujuk kepada Undang-Undang Pendidikan Nasional.
6. Aliyah, sekolah Islam tingkat menengah atas.⁵ Adalah istilah yang digunakan pada tingkat jenjang pendidikan menengah atas pada Madrasah yaitu setara dengan SLTA. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975, bahwa Aliyah pada Madrasah sejajar dengan SMU pada pola pendidikan umum, dan sederajat.

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 768.

⁵ *Ibid.*, h. 694.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Komite Sekolah dalam membuat kebijakan peningkatan mutu pendidikan, pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 2 Takengon Aceh Tengah.
3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi Komite Sekolah dalam pelaksanaan mutu pendidikan dalam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

- a. Secara teori bahan masukan bagi sekolah dan kepala sekolah dalam memberdayakan Komite Sekolah.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi penyelenggara sekolah untuk dapat merekrut warga masyarakat anggota Komite Sekolah yang sesuai dengan tujuan, pelaksanaan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan membantu sekolah, sehingga memungkinkan sekolah lebih efektif melaksanakan tugas pokoknya.

- b. Sebagai bahan masukan penyelenggara Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon dalam meningkatkan efektivitas Komite Sekolah secara efektif dan efisien.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Komite Sekolah

Dengan adanya perubahan paradigma manajemen pendidikan, keberadaan BP3 perlu dibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran, dan kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan masyarakat sekolah yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu. Untuk terciptanya masyarakat sekolah yang kompak dan bersinergis, maka Komite Sekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 044/U/2002.¹

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.²

Selain penggantian Undang-undang Sisdiknas, pemerintah juga telah menggantikan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0293/U/1993 Tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tertuang juga dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (24) yaitu Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Ayat (25) Komite Sekolah/Madrasah

¹ Seri Pendidikan Nasional, *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Eka Jaya, 2003), h. 252. Yang tercantum dalam Pasal I. ayat 1 dan 2 pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan Komite Sekolah.

² Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Memenangkan Persaingan Mutu* (Jakarta: Rakasta Samasta, 2000), h. 170.

adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, Komite Sekolah, serta Tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.

Kesemuanya itu merupakan, keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru serta memberi kesempatan bagi anak usia sekolah tujuh (7) tahun sampai usia lima belas (15) tahun yang menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin tersedianya dana.

Dari berbagai upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan, penulis menaruh perhatian khusus tentang keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Apakah mampu meningkatkan kualitas pendidikan?

Acuan pembentukan Dewan Pendidikan, di mana Dewan Pendidikan berperan sebagai: Pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendukung (*Supporting Agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengontrol (*Controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dan mediator antara pemerintah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.

Dewan pendidikan juga berfungsi di antaranya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat perorangan/ organisasi, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan peningkatan pendidikan termasuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan kebutuhan pendidikan.

Untuk mengefektifkan institusi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang menjadi bagian dari konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), akan memberikan jaminan pelibatan semua elemen masyarakat yang peduli akan pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar (PBM).

Adanya sinergi antara Komite Sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Masalah yang terjadi di lapangan, kehadiran Komite Sekolah hanyalah sebagai bagian formalitas semata, dan pihak orang tua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam tugas dan peran Komite Sekolah di tiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Komite Sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka.

Pemberlakuan manajemen berbasis sekolah membawa implikasi kepada sekolah tidak menjadi subordinat lagi dari pemerintah maupun yayasan, tetapi bersifat otonom. Pendekatannyapun tidak birokratis lagi, melainkan profesional. Ruang gerak para guru dan kepala sekolah menjadi lebih luas dan leluasa, termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolah. Adanya keleluasaan gerak kepala sekolah dalam mengelola anggaran tersebut menyebabkan peranan Komite Sekolah menjadi besar dan memiliki posisi tawar yang tinggi. Sebab, semua keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan selalu memberdayakan semua pihak *stakeholder*.

Melalui Komite Sekolah, masyarakat atau orang tua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang

dikeluarkan. Di samping itu, masyarakat melalui Komite Sekolah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke sekolah, karena di era reformasi ini transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan. Meningkatkan anggaran pendidikan saat ini tidak ada cara lain selain mengefektifkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan melalui Komite Sekolah adalah sangat tepat, mengingat selama ini pendidikan sulit mengharapkan dukungan dari anggaran pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diharapkan suatu alternatif untuk memecahkan masalah pembiayaan pendidikan yang mana setiap tahunnya anggaran pendidikan tidak memadai bahkan terkesan tidak adil. Menurut hemat penulis sesuai dengan realita di lapangan, sejak dikeluarkannya Kepmendiknas tahun 2002 peran Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah perlu dipertanyakan, bahkan ada indikasi keberadaan Komite Sekolah hanya sebagai formalitas perwakilan masyarakat (orang tua siswa) di mana setiap tahunnya biaya pendidikan cenderung meningkat dan tanpa terkendali. Ini dipicu ketidak mampuan Komite Sekolah dalam hal mencari sumber dana di luar orang tua siswa.

Perlu diketahui salah satu tujuan Komite Sekolah adalah harus mampu bekerjasama dengan pihak luar baik perorangan/organisasi mengenai finansial. Komite Sekolah dan Kepala Sekolah harus bertindak bijak dan adil masalah pemungutan dana dari orang tua siswa, walaupun hal ini dibenarkan oleh UU No. 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Dengan pemberdayaan Komite Sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan Komite Sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat.

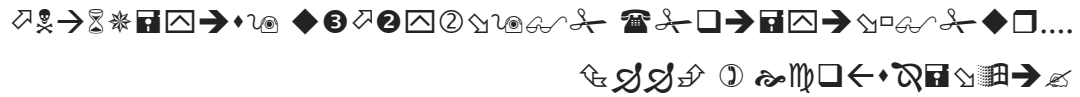
Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, pemberian dana pusat ke sekolah secara block grant mempersyaratkan adanya pengawasan dari Komite Sekolah atau dewan pendidikan (Kompas, 19 September 2002). Dengan begitu, penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan.³

Sekarang yang dibutuhkan masyarakat adalah itikad baik dari penyelenggara pendidikan, jadi tidak hanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tetapi perlu pelibatan *stakeholder* pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar.

Selain itu peran Kepala Sekolah, Guru dan orang tua siswa sangat mutlak di kedepankan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, hanya dengan demikian apa yang diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai. Salah satu alternatif agar peran Komite Sekolah lebih efektif dan sesuai acuan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu sosialisasi dan selektif dalam pembentukan Komite Sekolah.

Keberadaan Komite Sekolah terutama harus mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan, komitmen dan konsisten serta mengedepankan pencarian dana dari luar selain orang tua siswa. Kalau hal ini tidak dipenuhi, jangan terlalu berharap pendidikan kita akan lebih baik, bahkan cenderung kualitasnya menurun. Begitu juga harus sesuai hasil musyawarah mufakat, tidak sepihak. Kondisi inilah yang membuat mutu pendidikan tepuruk atas ulah sebagian dari pembuat kebijakan, karena tidak dilandasi dengan itikad baik, dan kesungguhan. Padahal dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj. 77.

³ [http // www.smknl-CMS.sch.id/ind/fropila. Html](http://www.smknl-CMS.sch.id/ind/fropila.Html). Tanggal 10-05-2008.



“.... dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”
 Al-Hajj 77.” ⁴

Apapun bentuk organisasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan
 sebut saja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai pengganti BP3
 tidak dapat berbuat banyak, sepanjang masih ada oknum-oknum yang tidak
 bermoral, hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan
 golongan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujaadilah ayat 11.



“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
 "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah
 akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah
 kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang
 yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
 beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” ⁵

⁴ Khadim al Haramain asy Syarifain, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah Munawwarah: Kerajaan Saudi Arabia, 2000), h. 523.

⁵ *Ibid.*, Mujaadilah., h. 910.

Berdasarkan ayat di atas Komite Sekolah dan *stakeholder* yang terkait secara keseluruhan menjalankan usaha-usaha semua yang menyangkut dengan pendidikan.

Fenomena di atas suatu bukti konkret bahwa keberadaan Komite Sekolah kurang lebih sama dengan BP3. Jadi apa yang diharapkan dari Komite Sekolah? dalam hal peningkatan mutu pendidikan.

Untuk masa depan kinerja Komite Sekolah lebih ditingkatkan, terutama masalah finansial dari luar selain orang tua siswa. Meskipun demikian, kita tetap berprasangka baik atas keinginan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan lewat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Tujuan pembentukan Komite Sekolah di antaranya sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tiap satuan pendidikan. Dengan demikian, segala kebijakan operasional tiap satuan pendidikan sebenarnya dapat melalui konsultasi dengan Komite Sekolah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan). Lebih jauh disebutkan bahwa Komite Sekolah mempunyai peran di satuan pendidikan, yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat.⁶

Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan manajemen pendidikan ditingkat sekolah.

⁶ <http://64.203.71.11//kompas-cetak/0408/02/Didaktika/1179910.htm>. (Sabtu tgl, 10-Mei-2008.

Beberapa aspek manajemen yang secara langsung dapat diserahkan sebagai urusan yang menjadi kewenangan tingkat sekolah adalah sebagai berikut:⁷

Pertama, menetapkan visi dan misi, strategi, tujuan logo, lagu dan tata tertib sekolah. Urusan ini amat penting sebagai modal dasar yang harus dimiliki sekolah. Sudah barang tentu, sekolah harus menjalin kerja sama sebaik mungkin dengan orang tua dan masyarakat sebagai mitra kerjasama yang tergabung dalam Komite Sekolah, serta seluruh warga sekolah harus dilibatkan secara aktif dalam menyusun program kerja sekolah, dan sekaligus lengkap dengan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Kedua, memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga kerja administrative yang dimiliki. Sudah barang tentu beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota perlu mendapat pertimbangan secara bijak.

Ketiga, menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah. Kebijakan itu diambil setelah meminta pertimbangan dari Komite Sekolah, termasuk resiko anggaran yang diperlukan untuk itu. Sekolah juga harus meminta pendapat siswa dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang akan diadakan di sekolah.

Keempat, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah, dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada dan pengadaan sarana dan perasarana pendidikan di sekolah dapat dilaksanakan oleh sekolah, dengan tetap mengacu kepada standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Kabupaten/Kota.

⁷ Suryadi, *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah : Mewujudkan Sekolah-Sekolah yang Mandiri dan Otonom* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), h. 8.

Kelima, penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten.

Keenam, proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah. Kepala sekolah dan guru secara bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah.

Ketujuh, urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep peningkatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) merupakan kepentingan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.

B. Kedudukan dan Sifat.

Komite Sekolah mempunyai acuan dalam pembentukannya, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 Tanggal 2 April 2002, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik di satuan pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. Ada sekolah Negeri dan Swasta yang didirikan oleh Yayasan Penyelenggara Pendidikan.

Di samping itu Komite Sekolah juga merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis dibentuk secara demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.⁸ Selanjutnya nama badan ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Adapun kedudukan dari Komite Sekolah tertuang dalam tujuan pembentukannya. Tujuan dari Komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 014/U/2002 Tanggal 2 April 2002, adalah: *Pertama*, Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. *Kedua*, Meningkatkan tanggung jawab atau peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. *Ketiga*, Menciptakan suasana dalam kondisi transparan, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Komite Sekolah juga merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya hal ini secara tegas dinyatakan Anggaran Dasar Komite Sekolah bab IV pasal 4 ayat 1 dan 2, April 2002, yang menyatakan bahwa Komite Sekolah bersifat:

1. Indenpenden dilandasi prinsip kemandirian organisasi dengan etika serta hubungan kerja sama dengan berbagai pihak yang mengarah kepada tujuan perbaikan kualitas di sekolah.
2. Tidak terikat kepada kepentingan dan keuntungan baik pribadi maupun golongan seperti partai politik, Mazhab keagamaan, dan sebagainya.

⁸ *Ibid.* Seri Pendidikan., h. 251.

Sifat Komite Sekolah yang demikian itu, sebenarnya menunjukkan jati diri sekolah dan masyarakat yang memiliki kemerdekaan dalam menyelenggarakan fungsinya masing-masing, tetapi saling berkontribusi dan membuka diri, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan semua pihak yang berkepentingan secara adil, tanpa mengabaikan tujuan pendidikan secara universal dan institusional.

Masyarakat tidak mungkin dijauhkan dari sekolah, karena masyarakatlah yang menghidupkan sekolah dan karena masyarakat sekolah itu ada dan eksis, walau harus diakui masyarakat juga yang mendapat keuntungan cukup besar dengan memanfaatkan jejang dan jenis sekolah sesuai kebutuhannya, dalam mempersiapkan kehidupan masa depannya. Dalam kaitan ini, sekolah dan masyarakat bersifat simbiotik, yaitu saling menguntungkan dan ketergantungan.

Pendidikan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana minat dan bakat yang dimiliki masing-masing. Oleh karenanya setiap masyarakat yang menyekolahkan anggota keluarganya, adalah dengan tujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sehingga lebih baik dalam hidup dan kehidupannya.

Pendidikan adalah sarana untuk dapat melahirkan keunggulan-keunggulan dan mampu berkompetisi pada masa yang akan datang, dalam hal ini sekolah dituntut agar menumbuhkan kembangkan keunggulan tersebut, sebab kehidupan masa depan dalam konteks keinginan adalah untuk menemukan manusia unggul yang mampu bersaing menghadapi masa depan.

Keunggulan yang dimaksud adalah keunggulan partisipatoris, artinya manusia unggul adalah yang ikut serta aktif di dalam persaingan yang sehat untuk mencari yang terbaik. Keunggulan partisipatoris dengan sendirinya berkewajiban untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi

individual yang akan digunakan di dalam kehidupan yang penuh persaingan yang semakin lama semakin tajam dan berkembang.⁹

Sekolah atau pendidikan sepertinya memang tidak bisa tidak harus tahu apa kepentingan pelanggannya atau stakeholdersnya, bahkan harus mengetahui apa tantangan masa depan yang dihadapi masyarakat pengguna. Jika persekolahan dapat mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pengguna, maka sekolah secara dini telah mempersiapkan diri secara benar.

Masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah, tentu saja akan membantu Komite Sekolah. Sebab dengan keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah memungkinkan sekolah secara utuh mengetahui dan memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat pengguna, demikian juga sebaliknya.

Komite Sekolah dalam hal ini menjadi perpanjangan tangan masyarakat yang juga berperan sebagai fasilitator sekolah dengan kemasyarakatan. Masyarakat memiliki hak yang terbaik dari penyelenggaraan sistem pendidikan persekolahan. Keterlibatan masyarakat ini adalah wujud desentralisasi dan otonomi pendidikan, sebagai bagian dari reformasi pendidikan.

Selama ini persekolahan diatur oleh satuan atasan dengan melaksanakan kebijakan sentral. Akibatnya sekolah kehilangan jati diri dan tidak mengenal diri dan masyarakat pengguna. Melalui reformasi yang merupakan koreksi atas kekeliruan itu, sentralisasi diubah menjadi desentralisasi. Salah satu wujud dari desentralisasi itu adalah lahirnya atau diakuinya masyarakat terlibat secara langsung dalam sistem persekolahan melalui satu wadah yang bersifat simbiotik, wadah itu disebut dengan Komite Sekolah. Sejalan dengan reformasi pendidikan, ternyata dalam dunia global

⁹ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, dalam Perspektif Abad 21* (Magelang: Tera Indonesia, 1999), h. 69.

telah terjadi perubahan dalam memandang sekolah. Sekolah dianggap sebagai lembaga layanan yang harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat penggunanya.

Lembaga pendidikan persekolahan merupakan lembaga layanan yang mempunyai tugas memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh pelanggan atau penggunanya. Terdapat penggolongan pengguna jasa layanan persekolahan. *Pertama*; pelanggan internal, yaitu guru, staf dan penyelenggaraan sekolah. *Kedua*; pelanggan eksternal, yaitu masyarakat dunia usaha dan pemerintah yang memanfaatkan proses dan produk persekolahan.¹⁰ Penggolongan ini untuk mempertegas posisi sekolah dalam menyerap aspirasi masyarakat yang menggunakan jasanya, yaitu jasa pendidikan dan pengajaran.

Tuntutan paradigma baru pendidikan Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia baru, menuntut prinsip-prinsip dasar yaitu:

1. Partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikannya (*community based education*).
2. Demokratisasi proses pendidikan.
3. Sumber daya pendidikan yang profesional.
4. Sumber daya penunjang yang memadai¹¹.

Wujud kehadiran masyarakat dalam mengelola pendidikan, menjadi Komite Sekolah relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sekolah secara simultan. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan *stakeholders* pada dasarnya akan memberikan aspirasi yang tinggi terhadap sekolah untuk dapat lebih otonom dalam mengelola persekolahan. Masyarakat yang

¹⁰ Edward Sallis, *Total Quality management in Education* (London: Kogan Page Limited, 1993), h. 32.

¹¹ Azjumardy Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara 2006), h. 147.

memiliki akses akan mengurangi anomali-anomali atau penyimpangan dan ketidaknormalan manajerial dan memperkuat otonomi sekolah, dan harus disadari bahwa otonomi sekolah merupakan kebutuhan pada saat ini dan masa yang akan datang.

Acuan dari berbagai keputusan juga mendukung kelebihan sistem otonomi sekolah tersebut. Otonomi sekolah dapat menyertakan masyarakat dalam melaksanakan keputusan-keputusan sekolah, sudut pandang lain di kemukakan oleh Peasch 1994 yang disepakati oleh Cranston 1993 bagi mereka yang utama dari otonomi sekolah adalah peningkatan manajemen sekolah untuk membebaskan pengalokasian sumber daya dari kepentingan yang bersifat administratif ke kepentingan yang lebih bersifat edukatif, dari sisi rekomendasi tersebut bisa diterima dan ditindaklanjuti¹².

C. Manajemen Komite Sekolah.

Peningkatan terhadap pentingnya manajemen yang baik bagi pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mencapai kualitas lembaga pendidikan atau sekolah yang efektif. Manajemen yang baik merupakan hal yang esensial bagi semua sumber daya yang ada untuk dapat difungsikan dan memberi pengaruh secara maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan.¹³ Dengan kata lain pentingnya manajemen yang efektif sangat signifikan bagi keberhasilan murid dan pelajar dalam semua jenis dan jenjang lembaga pendidikan.

Dalam organisasi berlangsung aktivitas menejerial yang mewujudkan usaha bersama dari sejumlah orang untuk mencapai tujuan. Karena itu dalam proses manajemen dibuat perencanaan, ditetapkan pelaksanaan kegiatan,

¹² Jalal Fasli dan Dedi Supardi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita, 2001), h. 159.

¹³ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 117.

dibagi tugas, diberikan imbalan, diberikan tanggung jawab, dan diawasi serta dievaluasi hasil yang dicapai. Menurut pendapat Winardi (1990) manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendeterminasi serta mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁴

Seperti telah disebutkan di atas bahwa Komite Sekolah memiliki peran sebagai bahan pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*) dan badan mediator (*mediator agency*). Indikator kinerja yang dilakukan oleh Komite Sekolah dapat terukur dari peran tersebut yang tercakup di dalamnya fungsi badan-badan tersebut dan fungsi manajemen pendidikan.

a. Komite Sekolah Sebagai Bahan Pertimbangan (*advisory agency*).

Dalam perannya sebagai badan pertimbangan, untuk tahap perencanaan Komite Sekolah memiliki peran untuk mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS.

Berkaitan dengan pelaksanaan program, Komite Sekolah berperan penting untuk memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah termasuk proses pembelajarannya. Dengan berlakunya otonomi pendidikan dan pengelolaan pendidikan yang lebih otonomi di sekolah guru memiliki tugas penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang kondusif bagi sarana demokratisasi pendidikan.

Kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan, Komite Sekolah berperan untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Tugas ini akan dapat berguna dalam

¹⁴ *Ibid.*

memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat diperbantukan ke sekolah.

b. Komite Sekolah Sebagai badan Pendukung (*Supporting Agency*).

Komite Sekolah dapat berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan untuk melakukan pemantauan tenaga pendidikan sehingga dapat gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi di sekolah. Untuk seterusnya dapat di tindaklanjuti dengan melakukan pemberdayaan guru sukarelawan, termasuk tenaga pendidikan non- guru, di sekolah yang masih menghadapi persoalan dalam kekurangan tenaga kependidikan.

Komite Sekolah juga berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat. Tahap selanjutnya, bantuan sarana dan prasarana yang ada dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan atau bantuan tersebut.

c. Komite Sekolah Sebagai Badan Pengawas (*Controlling Agency*).

Pengawasan merupakan tindakan terahir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Menjalankan tugas ini, Komite Sekolah dapat melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada. Komite Sekolah dapat melakukan pemantaun terhadap pelaksanaan program, apakah sesuai dengan kebijakan yang ada. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program adalah bagaimana alokasi waktu dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program yang dilakukan di sekolah.

Untuk kedepannya berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penuntasan wajib belajar.

Dengan memberikan data perkembangan siswa secara kuantitatif kepada Dewan Pendidikan. Demikian juga dengan mutu pendidikan, Komite Sekolah melakukan penilaian terhadap hasil kuluaran pendidikan di sekolah.

d. Komite Sekolah Sebagai Badan Mediator (*Mediator Agency*).

Sebagai badan mediator, Komite Sekolah untuk menjadikan penghubung sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Berbagai persoalan yang sering dialami orang tua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya, sering kali terbentur pada sebatas keluhan uang sekolah, media pendidikan, program pengajaran dan lain-lainya. Kurang direspon oleh pihak sekolah. Karena itu kehadiran Komite Sekolah pada posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan orang tua wali murid tersebut.

Peran sebagai mediator yang dilakukan Komite Sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan sekolah. Dengan komunikasi berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah sehingga berbagai kebijakan dan program dapat akutanbel kepada masyarakat. Fungsi ini dapat dijalankan dengan memberdayakan sumber daya yang ada pada orang tua murid bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Secara keseluruhan indikator tugas Komite Sekolah melalui peran-peranya adalah, aktif dalam setiap pengambilan kebijakan di sekolah, siapa saja yang memiliki harapan dan kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat terlibat di dalamnya seperti orang tua wali murid, peserta didik, guru, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, pelaku ekonomi, pelaku industri dan lingkungan sosial lainnya.

Pelaksanaan manajemen Komite Sekolah ketertiban masyarakat tersebut di formalakan dalam wadah Dewan Pendidikan untuk tingkat Kabupaten/ Kota dalam Komite Sekolah pada tingkat satuan pendidikan atau

sekolah. Sebagai lembaga mandiri Komite Sekolah berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan. Juga berperan untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Implementasi manajemen Komite Sekolah mensyaratkan terbentuknya Komite Sekolah sebagai institusi yang akan melaksanakan manajemen berbasis sekolah tersebut. Pembentukan Komite Sekolah tentunya bukan hanya sekedar terbentuknya pengurus dan memiliki struktur organisasi yang lengkap. Tetapi harus diikuti dengan langkah-langkah nyata seperti pengidentifikasian tujuan dan manfaat, perencanaan dan pelaksanaan program.

Untuk dapat melaksanakan manajemen berbasis sekolah maka Komite Sekolah memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendukung penyelenggaraan pendidikan, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga. Pengontrolan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan serta berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Optimalisasi peran dan tugas Komite Sekolah tersebut di atas , tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Komite Sekolah yang dapat berperan dengan baik maka akan dapat meyukseskan pelaksanaan manajemen Komite Sekolah.

Pelaksanaan manajemen Komite Sekolah berimplikasi terhadap berbagai aspek kegiatan sekolah. Hal utama yang paling menonjol dan harus menjadi cirinya adalah munculnya sekolah berkemampuan unggul (*competitive advantage*). Peningkatan kualitas pengelolaan sekolah dengan latar belakang manajemen Komite Sekolah merupakan proses keseluruhan dalam suatu organisasi, berjalan secara nyata, jangka panjang, membudaya, baik bagi personil, pemimpin, maupun bagi para siswa atau murid.

Salah satu sasaran dari manajemen Komite Sekolah adalah peningkatan mutu pendidikan sehingga sekolah memiliki keunggulan kompetitif. faktor penting yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah keberadaan Komite Sekolah. Komite sekolah adalah lembaga otonom yang memiliki peran-peran strategis terhadap pencapaian target pembelajaran.

Adanya kewenangan sekolah, maka berarti pengelolaan dan pelaksanaan program kegiatan di sekolah berada pada keterampilan dan kemampuan pengelolaan sekolah. Dihak lain, pelaksanaan manajemen Komite Sekolah menuntut adanya kesiapan SDM dalam pengelolaan sekolah atau lembaga dalam berbagai aktivitas baik dalam penataan dan pengembangan organisasi.

Secara teoritis, manajemen Komite Sekolah merupakan sistim pengelolaan persekolahan yang memberikan wewenang dan kekuasaan kepada institusi sekolah untuk mengatur kehidupan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan dalam manajemen Komite Sekolah. Sekolah merupakan institusi yang memiliki *Full Authority and Responsibility* untuk secara mandiri menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan lokal yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah.

Berdasarkan tanggung jawab dan beban yang diemban oleh sekolah untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran menuntut agar pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran ada beberapa langkah, oleh karena itu dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik, untuk itu diperlukan manajemen yang baik pula yang meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pengaturan (*Directing*)
4. Koordinasi (*Coordinating*)
5. Kepemimpinan (*Leadership*)

6. Komunikasi (*Communicating*)
7. Pengawasan (*Controlling*)
8. Evaluasi (*Evaluating*)¹⁵

Dalam kegiatan *planning* akan ditentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan, kemudian diatur pula hubungan kerja antar sesama pengelola yang termasuk dalam kegiatan *Organizing*, koordinasi dari seorang pimpinan juga diperlukan dalam sistem pengelolaan pendidikan, adanya komunikasi baik antara pengelola, *supervisi* (pengawasan), dan yang terakhir evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya rencana kegiatan, pengelolaan juga sangat diperlukan, agar seluruh kegiatan pendidikan tersebut berjalan lancar dan membawa hasil semaksimal mungkin.

D. Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah dalam peningkatan Mutu Pendidikan.

Mutu pendidikan akan meningkat jika persekolahan memiliki Komite Sekolah yang dapat menyerap kepentingan sekolah secara utuh. Mutu sekolah yang sesuai dengan kepentingan pengguna jasanya, merupakan kebutuhan yang sangat diharapkan masyarakat. Sekolah yang bermutu tentu saja memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi, komponen-komponen tersebut harus ada dan terselenggara berdasarkan kebutuhan sekolah dan terpenuhi secara maksimal dan nyata dilaksanakan dalam proses rutinitas pendidikan.

Bila pendidikan diibaratkan dengan sebuah pabrik, maka pabrik tersebut bila ingin menghasilkan produk yang berkualitas dimulai dengan

¹⁵ Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, cet. 15 (Jakarta: Sumber Widya, 1996), h. 25.

memasok bahan baku yang berkualitas pula, dengan alasan semakin baik bahan bakunya (*raw input*) akan semakin baik pula kualitas *output*-nya.¹⁶

Salah satu standar sekolah bermutu ialah jika sekolah tersebut memiliki komponen-komponen yang bermutu meliputi: (1) kegiatan belajar mengajar, (2) Manajemen, (3) sarana dan prasarana pendidikan, (4) fisik sekolah, (5) Komite Sekolah, (6) Pendanaan, (7) Partisipasi masyarakat.¹⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa komponen-komponen yang dapat menjadikan pendidikan bermutu terdiri dari beberapa komponen, salah satunya partisipasi masyarakat, dalam kaitan ini yang dimaksudkan dengan masyarakat adalah masyarakat yang secara langsung terlibat dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Pada saat ini, masyarakat yang terlibat langsung yaitu masyarakat yang berada pada wadah organisasi Komite Sekolah, dan telah menjadi bagian dari sistem pendidikan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pendidikan akan kondusif bila berhubungan dengan lembaga pendidikan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Mutu pendidikan dan sekolah tertuju juga pada mutu lulusan. Merupakan sesuatu yang mustahil, pendidikan atau sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu, jika tidak melalui proses pendidikan yang bermutu pula. Terjadi proses pendidikan yang bermutu jika didukung oleh beberapa faktor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu, adalah harus didukung oleh personalia, seperti administrator, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu dan profesional. Hal tersebut didukung pula oleh sarana dan prasarana pendidikan, media serta sumber belajar yang memadai, baik mutu maupun jumlahnya dan biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat serta lingkungan yang mendukung. Mutu pendidikan bersifat menyeluruh,

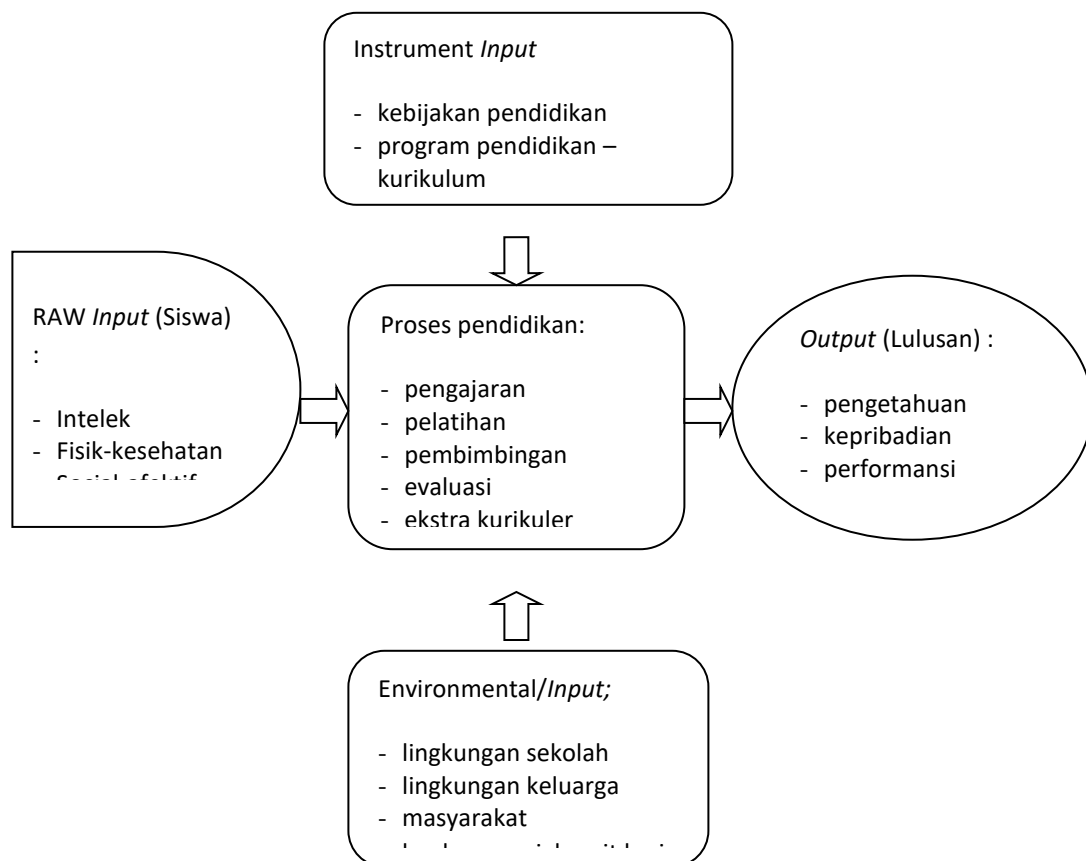
¹⁶ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 80.

¹⁷ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 21.

menyangkut semua komponen pelaksana, dan kegiatan pendidikan, atau disebut mutu total atau *total quality*,¹⁸ adalah sesuatu yang tidak mungkin, hasil pendidikan yang bermutu dapat dicapai hanya dengan satu komponen atau satu kegiatan yang bermutu. Kegiatan pendidikan cukup kompleks, satu kegiatan, komponen, pelaku, waktu terkait, dan membutuhkan dukungan dari komponen kegiatan, faktor-faktor yang terlibat dalam pengembangan mutu pendidikan secara sistemik dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar: I

Peta Komponen Pendidikan Sebagai sistem



¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, Ayi Novi Jami'at, Ahman, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 7.

Bagan 1 : Strategi Manajemen Komite Sekolah Dalam Pembelajaran Ditingkat Kabupaten/Kota

Untuk menjalankan perannya Komite Sekolah memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan kometmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan juga melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan industri dan pemerintah, fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat.

Selain itu Komite Sekolah memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan. Komite Sekolah juga berfungsi dalam mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Sampai saat ini di sebagian besar sekolah, peran Komite Sekolah masih terbatas karena tidak difungsikan sebagai Komite Sekolah yang sebenarnya. Pada umumnya anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat dipilih oleh kepala sekolah, anggota komite dipilih secara terbuka oleh orang tua murid dan masyarakat, tokoh masyarakat, perwakilan siswa dipilih secara demokratis.

Kepengurusan Komite Sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih oleh anggota. Dengan catatan ketuanya bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi.

Khusus jabatan ketua Komite Sekolah bukan berasal dari kepala satuan pendidikan akan tetapi oleh masyarakat, panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya lima orang yang terdiri dari kalangan praktisi pendidikan seperti: Guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerhati pendidikan (LSM) peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri, dan orang tua peserta didik.

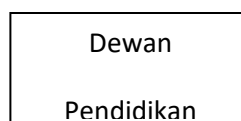
Sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing setiap anggotanya membuat perencanaan yang menyangkut peningkatan mutu pendidikan berdasarkan masukan-masukan dari hasil analisis tentang kelemahan dan penyimpangan yang dihadapi, tiap-tiap pengelolaan mengadakan pembenahan dan perbaikan.

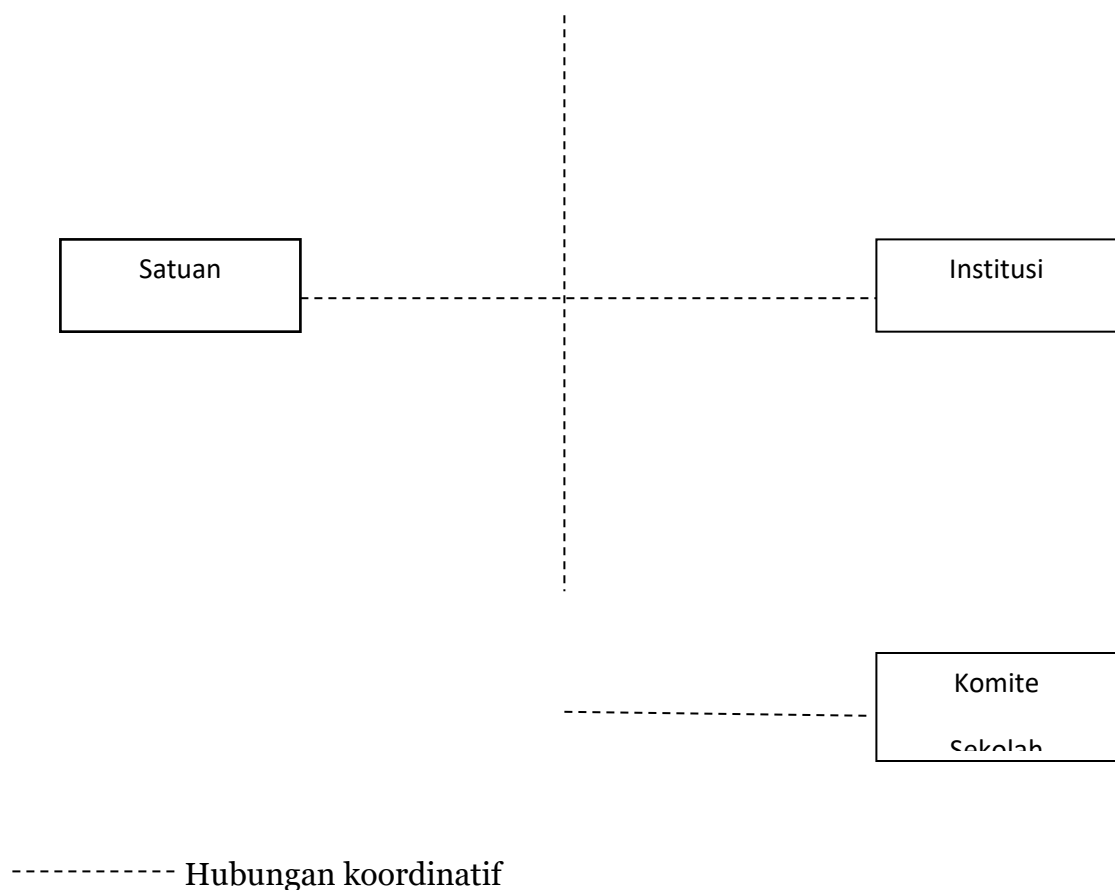
Penyempurnaan langsung berkenaan dengan kegiatan, kinerja atau performansi dari pelaksana. Pengembangannya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, langkah-langkah atau prosedur, metoda kerja, peralatan dan bahan sampai pada sumber yang digunakan atau sistem yang lebih terarah.

Pengembangan struktur organisasi sebagai dimensi organisasi dalam manajemen menjadi penting untuk menjawab berjalannya kepemimpinan atau Komite sekolah di setiap sekolah. Sehingga ada proses pengembangan karier dan mendorong kematangan staf dalam melaksanakan tugas perbaikan mutu pendidikan dari semua komponen guru, dan karyawan yang dimiliki, serta dukungan masyarakat. Struktur Komite Sekolah yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

Gambar 2

Hubungan Komite Sekolah dengan instansi terkait

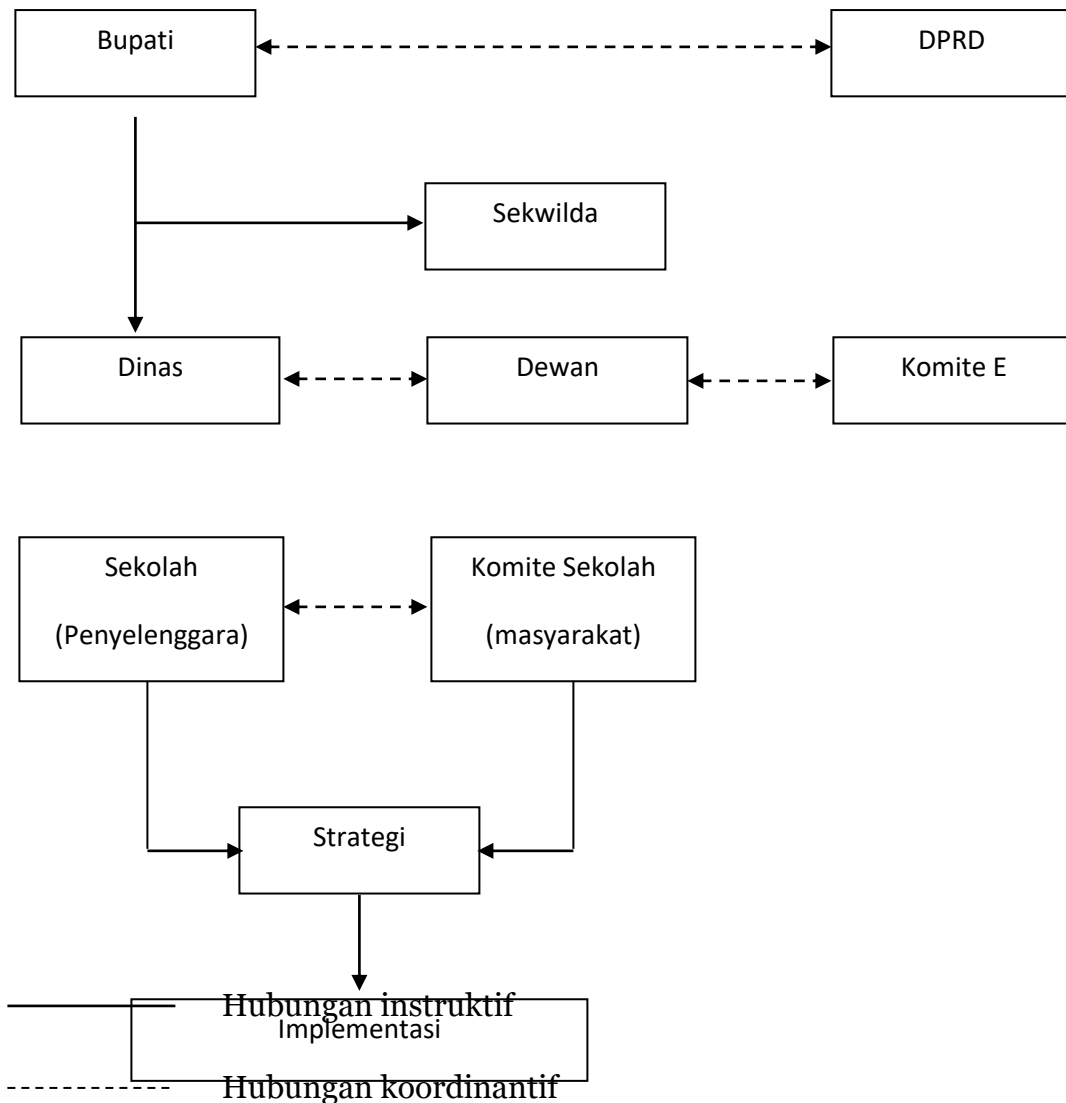




Menunjukkan bahwa berdasarkan gambar di atas antara Dewan Pendidikan dan Satuan Pendidikan dan instansi yang terkait satu dengan yang lainnya saling koordinasi dalam membuat program dan kebijakan menurut kebutuhan sekolah atau pendidikan dalam memajukan kualitas pendidikan. Dapat dilihat pada struktur berikut hubungan Komite di tingkat Kabupaten.

Gambar 3.

Hubungan sekolah dengan Komite Sekolah di tingkat Kabupaten / Kota



Komite Sekolah bekerja sebagai mitra kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan sekolah. Komite Sekolah ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dan dapat menyumbangkan ide untuk mengembangkan sekolah, dan menjalankan tugasnya yang tidak terlepas dari perundang-undangan pendidikan yang telah ditentukan, mereka dapat bermusyawarah mengambil suatu inisiatif. Kepala sekolah tersebut pada umumnya berpartisipasi dan bekerja secara demokratis.

Partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di

sekolah. Ukuran partisipasi masyarakat diukur dengan keikutsertaan masyarakat menanggung biaya sekolah baik yang masuk katagori bantuan pembangunan yang populer dengan istilah Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) maupun iuran bulanan peserta didik¹⁹ partisipasi ini berikutnya dikembangkan kepada: 1. Partisipasi mengambil kebijakan dan keputusan. 2. Partisipasi dalam melaksanakan. 3. Partisipasi dalam keuntungan. 4. Partisipasi dalam mengevaluasi.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 012/U/2002 tanggal 2 April 2002 dengan sendirinya Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan BP3 dinyatakan tidak berlaku. Sebagai pengganti pada tingkat satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan persekolahan, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat 3 juga memberikan ketegasan yang sama bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tinggkat satuan pendidikan.

Lembaga pendidikan berusaha menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Tuntutan utama agar lembaga pendidikan dapat secara maksimal mencapai tujuan yang telah diorientasikan, maka dibutuhkan pengelolaan pendidikan yang mampu merespon kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya, melalui strategi pelayanan belajar yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan pengguna jasa pendidikan dan panggilan sumber daya pendidikan

¹⁹ Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Dewan Sekolah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 114.

melalui *stakeholder* menuju keberhasilan program pendidikan dari satuan pendidikan terkait. Secara konseptual, peran serta masyarakat dalam pendidikan lebih mengacu pada UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 54 ayat 2 bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Masyarakat sebagai objek pendidikan dalam pertumbuhan tidaklah berubah ketika ia berada di suatu tempat dan kemudian berada di tempat lain. Ditinjau dari aspek kehidupan masyarakatnya membentuk dirinya dengan cara berpikir, berbicara, bergaul. UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 55 ayat 2 menyebutkan penyelenggaraan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar pendidikan.

PP No. 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa standar pendidikan Nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan seluruh wilayah hukum NKRI. Penyelenggaraan berbasis masyarakat. Tentu akan memperhatikan ciri dari sekolah tersebut, seperti ciri keagamaan, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Ciri khas sekolah tersebut merupakan keistimewaan dan sesuai pula dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena itu dalam pengelolaannya mendapat bantuan dari pemerintah, meskipun pendanaan utamanya dan penyediaan fasilitas belajarnya ditanggung oleh masyarakat sekolah dan masyarakat sekitarnya.²⁰

Mengenai peran Komite Sekolah secara rinci berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 014/U/2002 yakni: 1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentu dan pelaksana kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam

²⁰ Sagala, *Manajemen Strategik*., h. 237.

rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 4. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Fungsi Komite di Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), Kriteria kinerja satuan pendidikan, Kriteria tenaga pendidikan, Kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.²¹

Untuk mewujudkan ketujuh butir tersebut, sebagai mana telah dikemukakan di atas, diperlukan aktualisasi pendidikan Nasional yang baru dengan prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan di zaman sekarang, yaitu partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikan (*community based education*) demokratisasi peroses pendidikan, sumber daya pendidikan yang professional, dan sumber daya yang memadai.

Aktualisasi pendidikan Nasional yang baru, mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak lagi dipikul oleh pemerintah, tetapi juga dibebankan kepada masyarakat. Maksud pernyataan ini adalah pemerintah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab kepada segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kepedulian yang sama terhadap mutu dan keberhasilan pendidikan²².

Banyak masyarakat yang pasif terhadap pendidikan, maka ditantang untuk lebih aktif bahkan proaktif sebagai penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya sekedar memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah dan membayar uang sekolah akan tetapi lebih penting masyarakat diharapkan turut serta menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah bertanggung jawab penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik

²¹ Irwan dkk, *Study Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2004), h. 38.

²² Sam M. dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 115.

E. Pemberdayaan Komite Sekolah.

Komite Sekolah sebagai organisasi dan wadah warga masyarakat yang peduli pada pendidikan, memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan sehingga proses penyelenggaraan sekolah berjalan dalam mencapai tujuan. Dalam kaitan ini Komite Sekolah lebih efektif dan dapat membantu kinerja manajerial sekolah. Hal ini perlu dilakukan, agar sekolah khususnya Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah terbantu dan Komite Sekolah dapat melaksanakan amanahnya sebagai wadah masyarakat dalam membantu persekolahan.

Bagi setiap pimpinan yang dipercayai sehingga mereka dapat mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan dan kemuliaan dengan keteladanannya. Pimpinan harus menjadi penolong, menggerakkan mengarahkan dan membimbing anggota organisasi untuk mematuhi. Maka dalam pelaksanaannya terkandung sikap kebersamaan atau pertanggung jawaban bersama.²³

Membangun kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71.

[illegible]

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar.....71”²⁴

183. ²³ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press), h.

²⁴ *Ibid*, *Al-Qur'an.. At-Taubah* 71., h. 291.

Pemberdayaan Komite Sekolah dilakukan bukan hanya untuk kepentingan Komite Sekolah saja, tetapi dilakukan untuk mengefektifkan fungsi, peran dan tujuannya sehingga berimplikasi kepada peningkatan kinerjanya dalam mendukung kinerja manajerial sekolah. Kinerja manajerial sekolah inilah yang harus dibantu Komite Sekolah sehingga setiap persekolahan dapat melaksanakan programnya.

Upaya pemberdayaan Komite Sekolah melalui proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan merubah sistem yang ada dalam Komite Sekolah itu sendiri. Umpamanya dengan mengembalikan aturan yang terkait dengan syarat dibentuknya Komite Sekolah di setiap persekolahan, adalah upaya pemberdayaan Komite Sekolah dalam mendukung kinerja manajerial sekolah.

Pemberdayaan Komite Sekolah itu dapat dimulai secara bertahap dan sesuai dengan aturan yang ada seperti:

1. Retruken calon anggota Komite Sekolah.
2. Kelayakan personil yang direkrut.
3. Kemampuan menyusun Program.
4. Pemahaman terhadap sistem persekolahan.
5. Kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan persekolahan.
6. Memahami konsep dasar lahirnya Komite Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002.

Melalui upaya-upaya yang bersifat sistematis, pemberdayaan yang dilakukan melalui proses pemberdayaan dapat dilakukan memaksimalkan peran Komite Sekolah dalam mendukung kinerja manajerial sekolah, sehingga memungkinkan setiap sekolah mencapai tujuan sekolah tersebut

secara idial. Upaya pemberdayaan merupakan suatu keharusan untuk mengembalikan peran, fungsi dan tujuan Komite Sekolah sehingga sekolah dapat bekerja lebih baik.

Kehadiran Komite Sekolah adalah wujud dan upaya semakin dekatnya sekolah dengan masyarakat penggunanya, memungkinkan bagi keduanya secara bersama-sama melakukan telaah terhadap kebutuhan sekolah, dan masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam mendukung berbagai program sekolah, masyarakat yang ada pada umumnya adalah orang tua peserta didik, harus bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah, dan akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi peningkatan mutu sekolah secara menyeluruh.²⁵

Orang tua murid merupakan salah satu bagian untuk memberdayakan sekolah sebagai bagian dari manajemen persekolahan. Perlunya jarak yang dekat antara sekolah dengan masyarakat, antara sekolah dengan Komite Sekolah antara sekolah dengan keinginan siswa, akan menjadikan persekolahan mampu menangkap apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat terhadap persekolahan sebagai lembaga pendidikan.²⁶

F. Kajian Terdahulu.

Kajian dari beberapa karya ilmiah dan judul buku yang berdekatan dengan pembuatan tesis ini terdapat beberapa kesamaan yang penulis rencanakan, dari beberapa penelusuran tersebut ditemukan yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini di antaranya adalah:

²⁵ Aileen Mitchell Stewart. *Empowering people* (London: Pitman Publishing, 1994), h. 190.

²⁶ Rasyidin, *Keperibadian dan Kependidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2006, h. 206.

1. Warul Walidin AK Tim Peneliti MPD Provinsi NAD. Keberadaan Komite Sekolah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Komite Sekolah yang ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas No.004/U/2002, merupakan amat dari UU No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat. Peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Komite Sekolah juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, di samping itu juga Komite Sekolah berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.
2. Nurlan Ahaba Karyanya; Yang diharapkan dari Komite Sekolah. Pengurus Ikatan Penulis Indonesia Makasar (IPIM) Sulsel. Upaya pemerintah untuk peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan Pendidikan Nasional perlu dukungan dari semua *stakeholder*, mengingat masalah Pendidikan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama.
Bukti konkret keseriusan dan kesungguhan pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan yaitu digantinya UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena UU No.2 tahun 1989 dianggap tidak memadai lagi dan perlu disempurnakan, agar sesuai dengan amanat perubahan UUD 1945.

Penyempurnaan UU Sisdiknas diharapkan Sistem Pendidikan Nasional mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, Nasional, dan global.

3. Peran Komite Sekolah karya Mardiyono dalam pemberitaan Kompas, 13 Juli 2004. Mengapa komite sekolah mandul? Padahal, peran komite sekolah telah diatur oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April, yaitu sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap satuan pendidikan atau sekolah.

Tujuan pembentukan komite sekolah di antaranya sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tiap satuan pendidikan.

Dengan demikian, segala kebijakan operasional tiap satuan pendidikan sebenarnya dapat melalui konsultasi dengan Komite Sekolah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Pemilihan ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa yang hendak dicari dalam penelitian ini, data yang akan menggambarkan dan melukiskan realita dan kongkrit yang terjadi di lapangan, sehingga sesuai dengan penelitian ini

serta pelaksanaannya melibatkan Komite Sekolah, kepala sekolah, guru, staf-stafnya dan siswa.

Atas dasar pertimbangan, ingin mengungkapkan bagaimana keberadaan Komite Sekolah pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah. Dengan dasar tujuan tersebut maka peneliti memilih metode kualitatif. Bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹.

Aktivitas penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagai mana dikemukakan Bogdan dan Biklen yaitu: (a) Latar alamiah sebagai sumber data, (b) Penelitian adalah instrumen kunci, (c) Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil, (d) Peneliti dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif, (e) Makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif.²

Data kualitatif merupakan sumber dari diskripsi yang luas dan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Pendidikan ini melibatkan masyarakat setempat dimana sekolah ini berada, metode kualitatif mengadakan analisis data secara induktif mengarahkan sasaran penelitiannya pada upaya menemukan teori dari dasar, bersifat diskriptif lebih mementingkan dari pada proses hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi situs dan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang mengacu pada kaedah-kaedah penelitian kualitatif.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

² Bogdan R.C, dan Biklen S.K, *Qualitatif Research For Educational: An Introduction To Theory and Methods* (Boston: Allyn, 1982), h. 82.

B. Sumber Data.

Subjek penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian maka menetapkan untuk memperoleh informasi secara lengkap adalah warga sekolah, mulai dari Kepala sekolah, Tenaga pengajar, Tenaga Administrasi. Orang tua peserta didik, Komite Sekolah beserta anggotanya, Kepala seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Aceh Tengah, serta pihak-pihak lain yang dianggap dapat memberikan jawaban atas masalah penelitian.

Subjek penelitian itu adalah mereka yang terlibat dalam aspek manajerial dan pembelajaran juga yang terkait dengan *stakeholder* pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah. Penelitian ini dimulai awal bulan Agustus 2008 sampai dengan pada bulan Pebruari 2009.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam metode penelitian, peneliti merupakan instrumen utama (*key Instrument*). Hakikat penelitian sebagai instrumen kunci diaplikasikan dalam penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari: observasi, wawancara dan dokumentasi (catatan atau arsip).

Untuk mengkaji keakuratan data digunakan triangulasi atau sumber checking, terutama hasil wawancara untuk mempertinggi nilai akuratsi yang dipergunakan adalah alat pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi.

Mengadakan pengamatan langsung terhadap subjek atau lapangan yang diteliti, seluruh data hasil pengamatan selanjutnya dikumpulkan dan diklarifikasikan menurut jenisnya yaitu tentang tugas dan fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah

Negeri 2 Takengon Aceh Tengah. Peneliti melakukan dua tahap observasi yang sifatnya umum adalah pengamatan dilakukan terhadap berbagai unsur keberadaan sekolah, kepala sekolah, tenaga pengajar, siswa, orang tua murid dan yang dapat membantu penelitian ini.

Sedangkan yang bersifat khusus adalah pengamat melihat langsung dan mencatat situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesional maupun pengetahuan atau informasi yang langsung diperoleh dari data yang dibutuhkan, yang dilakukan terhadap manajemen Komite Sekolah yaitu (1). Struktur organisasi Komite Sekolah, (2). Pelaksanaan program/kegiatan Komite, (3). Keberadaan Komite di sekolah, (4). Data/dokumentasi kepengurusan Komite, (5). Usaha-usaha pengembangan yang berwujud financial yang dilakukan Komite, (6). Hasil akhir kinerja Komite Sekolah yang harus dipertanggungjawabkan. dalam memberdayakan tugas dan fungsinya pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.

2. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan petunjuk umum wawancara. Wawancara mengadakan tanya jawab langsung (secara lisan) dengan Ketua, Komite Sekolah, Pengurus Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, bagian Kesiswaan, KANDEPAG Kasi MAPENDA, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Tenaga Kependidikan, dan siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah. Hal-hal yang diwawancari adalah kegiatan Komite Sekolah dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan juga pemberdayaan Komite Sekolah. Teknik ini merupakan cara untuk mengkaji eksistensi dari perilaku manusia yakni: seperti mendengarkan, berbicara, melihat, berinteraksi, bertanya untuk dimintai keterangan atau penjelasan, mengecek kesungguhan dan menangkap yang terekam.

Ada beberapa interviu dalam melakukan penelitian ini:

- a. Peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti responden.
- b. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan susulan (*follow-up question*)
- c. Responden cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan.
- d. Responden dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa yang akan datang.
- e. Peneliti menayakan pokok-pokok yang penting untuk mempermudah analisis data.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi di gunakan untuk memperoleh data tentang lokasi yang nyata dijadikan sebagai objek peneliti baik keberadaan fisik maupun keadaan administrasi sekolah secara khusus mengenai:

- a. Profil atau catatan sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.
- b. Struktur organisasi sekolah dan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran sekolah.
- c. Program kerja sekolah dan Komite Sekolah.
- d. Data jumlah tenaga pengajar beserta staf dan Komite Sekolah.
- e. Visi dan Misi MAN 2 Takengon.
- f. Peraturan atau tata tertib guru dan siswa.
- g. Rekapitulasi guru dan siswa serta kualifikasi berdasarkan keahlian dan jejnjang pendidikan terakhir.
- h. Photo-photo yang mengacu dengan sekolah dan kegiatan sekolah.
- i. Inpentaris barang sekolah dan laporan bulanan, absensi guru.

D. Teknik Analisa Data.

Dalam penelitian kualitatif analisis data secara umum dibagi menjadi tiga tingkatan: analisis pada tingkat awal, analisis pada saat pengumpulan data lapangan, dan analisis setelah selesai pengumpulan data. Esensi analisis

data dalam penelitian kualitatif adalah mereduksi data, karena dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan harus mendalam dan mencakupi sesuai fokus dan tujuan penelitian.

Kegiatan di atas berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan ruang lingkup penelitian. Pada tahap ini analisis dilakukan adalah untuk memilih dan memperjelas variable-variabel, hubungan-hubungan, serta memperhatikan kasus-kasus lain. Upaya ini disebut dengan kerja kreatif peneliti kualitatif.³ Oleh karena itu desain kualitatif senantiasa dapat diperbaiki.

Penelitian kualitatif, analisis data berlangsung sejak awal pengumpulan data sampai selesai. Adapun proses analisis data pada saat pengumpulan data terdiri dari:

1. Kegiatan dimulai dari proses penelusuran data dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa keabsahan data sampai seberapa jauh tingkat kevalidtannya, agar data menjadi lebih sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.
2. Data atau informasi yang diperoleh dan diidentifikasi satuan analisisnya dan alternatif katagori yang mungkin untuk satuan analisis yang diteliti, diperbaiki, ditambah dan dikurangi yang disesuaikan.
3. Satuan analisis atau alternatif itu diuji keabsahannya melalui memperhatikan kemungkinan adanya kasus negatif dan kasus ekstrim, semua kegiatan ini dilakukan secara terstruktur dan terdekomentasi.

³ Huberman dan Miles, "*Data Management and Analysis Methodos*" In Denzin N.K. and Linclon Y.S. *Handbook of Qualitative Resea* (New Delhi: Sage Publications, 1994), h. 195.

Analisis data tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data hasil wawancara, hasil observasi, dan studi dokumentasi pada buku atau lembaran catatan lapangan. Kemudian peneliti mengelompokkan data/informasi yang diperoleh dalam satu fokus tertentu sesuai jumlah fokus penelitian. Data dari warga sekolah, mulai dari, kepala sekolah, tenaga pengajar, orang tua peserta didik, anggota Komite Sekolah, Kepala Departemen Agama, serta pihak-pihak lain yang dianggap dapat memberikan jawaban atas masalah penelitian dihubungkan dan diuraikan sehingga tidak ada lagi variasi data yang tidak sesuai.

Data dan informasi yang didapat dalam penelitian ini nantinya akan dianalisis dalam rangka menemukan simpulannya. Dalam kaitan ini Bogdan dan Taylor (1985) mengatakan analisis merupakan proses yang terus menerus dilakukan di dalam riset observasi yang sifatnya partisipan. Sedangkan pendapat Moleong (2000) dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data.

Adapun teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini, yang terdiri dari tiga proses yaitu: 1). Reduksi data, adalah suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 2). Penyajian data, merupakan sebuah proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. 3). Kesimpulan, dalam sebuah penelitian bersifat meluas, dimana kesimpulan pertama sifatnya belum final, akhirnya kesimpulan lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan konfigurasi yang utuh.⁴

⁴ Huberman A.M dan Miles.M.B, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Universitas Indonesia: UI-Press, 1992), h. 16.

Maka yang sangat urgen dalam penelitian ini adalah mencari keabsahan data-data yang kongkrit sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan, mendasari tindakan-tindakan aspek esensial dan analisis data yang mengacu pada kaedah-kaedah penelitian kualitatif, sebagai kuncinya observasi, wawancara, dokumentasi yang melibatkan semua yang terkait yaitu *sakeholder*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Latar Belakang dan Profil berdirinya Madsarah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.

MAN 2 Takengon berawal dari sekolah PGAN 4 tahun (Pendidikan Guru Agama Negeri) yang didirikan pada tahun 1953 yang dipimpin oleh bapak Sarwani Hasibuan, beliau memimpin PGAN hingga tahun 1959 dan selanjutnya oleh bapak Arifin Hasan sampai tahun 1961. Selanjutnya dijabat oleh Ibrahim AR sampai tahun 1964, dan pada tahun tersebut status PGAN 4 tahun berubah menjadi 6 tahun.

Pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1981 dipimpin oleh bapak M. Shaleh R, BA, pada tahun 1981 sampai pada tahun 1990 selanjutnya dipimpin kembali oleh bapak H. Arifin Hasan, dan pada tahun 1991 sampai 1992 dipimpin kembali oleh bapak M. Shaleh Rabel, BA. Pada tahun 1992 PGAN beralih fungsi menjadi (Madrasah Aliyah Negeri) MAN 2 Takengon yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1992 yang dipimpin oleh bapak M. Syarif Alamsyah BA, sampai pada tahun 1998. Tahun 1998-2000 MAN 2 Takengon dipimpin oleh bapak Drs. Supiandin dan pada waktu itu di Madrasah ini didirikan sebuah Dayah Tepadu Ruhul Amal pada tanggal 1

Juni 2000, yang diperakarsai oleh Pemerintah Daerah yang menjabat waktu itu sebagai Bupati bapak Mustafa M. Tamy, dan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu dijabat oleh bapak Drs. Djauhar (saat ini menjabat sebagai wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah).

Pada tahun 2000 MAN 2 Takengon dipimpin oleh bapak Drs. Amrun Shaleh, sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2004 masa kepemimpinan bapak Amrun Shaleh di Madrasah Aliyah Negeri ini mendapat peringkat kedua Madrasah berprestasi se Nanggroe Aceh Darussalam. Pada tahun 2005-2006 dipimpin oleh bapak walid, S.Ag. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2006 MAN 2 Takengon dijabat oleh Drs. Usman sampai sekarang.

2. Lokasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon, sarana dan prasarana.

Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon terletak dibagian Barat Kota Takengon dengan luas tanah 18.000 m yang berlokasi tepatnya di Jalan Takengon-Isaq desa Blang Kolak II. Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon juga masih tergolong sangat strategis, karena tidak jauh dari pusat kota di pinggir sungai pesangan aliran air Danau laut Tawar Takengon.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon. Tergambar nyata bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon terdiri dari beberapa gedung yang berbentuk permanen dan semi permanen dengan jumlah ruangan dan kelas sebanyak 24 ruangan yang terdiri dari 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Administrasi dan Tata Usaha 2 ruang Dewan Guru, 1 ruang Perpustakaan, 1 ruang Laboratorium, 1 ruangan Mushalla, 1 ruang Aula, 1 ruang Penginapan Putri (asrama) untuk Dayah dan 1 ruang Penginapan Putra

(asrama) juga untuk Dayah, dan 15 ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar dilaksanakan sehari-hari.

3. Visi Dan Misi Serta Tujuan.

a. Visi.

Visi MAN 2 Takengon adalah sebagai berikut: **Bermutu dalam berprestasi berdasarkan iman dan taqwa.**

Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon adalah salah satu Madrasah yang benar-benar ingin menciptakan generasi Muslim yang beriman dan bertaqwa sesuai dengan misi dan visinya yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis bertekad untuk mewujudkan generasi yang Islami yang taat dan patuh pada ajaran-ajaran Islam yang terpatuh dalam jiwa semua insan, sehingga mencerminkan akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan Rasulullah Subhanuahu Wata'ala.

Adapun yang menjadi indikator visi ini adalah (a) terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif, (b) terwujudnya proses Pakem dalam kegiatan belajar mengajar, (c) terwujudnya lulusan yang cerdas, cermat, cekatan dan kompetitif, (d) terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dan muktahir, (e) terwujudnya media pembelajaran yang intraktif dan inovatif, (f) terwujudnya pengembangan profesional guru yang berkualitas, (g) terwujudnya kelembagaan sekolah yang tetap belajar, (h) terwujudnya manajemen sekolah yang sistematis, (i) terwujudnya manajemen keuangan sekolah yang transparan dan akuntabilitas, (j) terwujudnya prestasi belajar akademik, (k) terwujudnya prestasi belajar non akademik, (l) terwujudnya warga sekolah yang berimtaq dan imtek, (m) terwujudnya warga sekolah yang peduli terhadap dunia pendidikan, (n) terwujudnya pengalangan dana pendidikan dari seluruh lapisan masyarakat.

b. Misi.

Misi MAN 2 Takengon adalah sebagai berikut:

1. Membentuk generasi Muslim yang mengamalkan ajaran Islam
2. Mewujudkan lulusan yang berkualitas, trampil, mandiri, berilmu pengetahuan, bertanggung jawab dan berguna bagi Nusa dan Bangsa serta dalam masyarakat Madani.
3. Menerapkan kurikulum yang Islami dan mewujudkan teknik pembelajaran yang profesional.
4. Mewujudkan administrasi yang baik dan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Menciptakan lingkungan yang asri.

Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon yang sudah berdiri kurang lebih 18 tahun, mulai dari tahun 1992 sampai sekarang aktif mengikuti dalam berbagai kegiatan, salah satunya Pramuka seperti mengikuti Saka Bayangkara, paskibraka aktif diikuti siswa siswi yang dibina dan ditempa oleh senior-senior dari Kopolres Aceh Tengah, selanjutnya pelatihan palang merah remaja bertujuan menumbuhkan sikap solidaritas kemanusiaan bagi sesama teman dan yang lainnya. Melaksanakan perlombaan antara kelas dari aspek kerapian, tata boga, cerdas cermat antar Kecamatan, Kabupaten, Propensi, Nasional, bahkan Internasional dan memperingati hari-hari besar Islam, mengadakan pesantren kilat pada bulan Ramadhan membentuk dan meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di lingkungan sekolah.

Selain memiliki tujuan-tujuan tertentu MAN 2 Takengon sangat membangun dan mendukung keberadaan Dayah Terpadu Ruhul Amal pada Madrasah tersebut melibatkan bermacam kegiatan berupa pengajian rutin setiap hari setelah shalat asyar, muhadharah, imlaq, ceramah, baik yang umum maupun yang khusus (religius) dalam berbagai kegiatan.

Secara keseluruhan Misi bermuara pada Visi yang telah dirumuskan di atas. Tujuan umum Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah adalah menjadi warga sekolah yang berbudi luhur, bersemangat tinggi, berimtek yang tangguh dan berimtaq kepada sang khalik.

4. Rekapitulasi guru dan siswa.

Berdasarkan data dan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, jumlah guru dan murid dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi guru dapat diperhatikan pada table berikut ini:

Tabel: 1. Tentang Rekapitulasi Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon¹

No	Keterangan Personil	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Guru Tetap Depak	7	24	31
2	Guru Tetap Dikjar	-	4	4
3	Guru Kontrak	-	-	-
4	Guru Tidak Tetap	7	14	21
5	Pegawai Tetap	1	1	2

¹ Laporan Bulanan Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah, tahun 2008/2009.

6	Pegawai Tidak tetap	1	1	4
7	Pesuruh Tetap	-	-	-
8	Pesuruh Tidak Tetap	2	1	3
	Jumlah	18	45	65

Table di atas dan dikaitkan pengamatan peneliti berdasarkan data dokumentasi sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah, menunjukkan jumlah porsonil guru yang telah diberi tugas dan pengawai tetap atau tidak tetap menurut bidang keahliannya secara menyeluruh.

Selanjutnya mengenai rekapitulasi siswa siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah, menurut jenjang kelas dan spesipikasi jurusan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen pada Madrasah.

2. Rekapitulasi Siswa dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel: 2. Tentang Rekapitulasi Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon²

Tingkat kelas	Jumlah Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
Kelas 1	5	100	115	215
Kelas II IPA	2	51	57	108
Kelas II IPS	3	75	80	155
Kelas III IPA	2	47	65	112
Kelas III IPS	3	58	92	150

² Ibid.

Jumlah	15	331	409	740
---------------	-----------	------------	------------	------------

Berdasarkan table di atas dapat diperkuat dengan hasil studi dokumentasi peneliti mengenai klasifikasi keadaan jumlah murid mulai dari kelas satu sampai kelas tiga, mencapai jumlah keseluruhan 740 siswa dan siswi yang ada pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.

Sedangkan kualifikasi berdasarkan keahlian dan jenjang pendidikan terakhir mengenai rincian keadaan guru menurut keahlian yang dibidangi berdasarkan jurusan studi yang diambil dengan berbagai macam-macam studi yang dikuasai oleh para guru untuk memegang mata pelajaran khusus yang diajarkan kepada siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah, dapat dijabarkan pada table berikut:

Tabel: 3. Kualifikasi Guru Berdasarkan Keahlian Dan Jenjang Pendidikan terakhir, Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.³

No	Kualifikasi Keahlian	Jumlah Guru	Jenjang Pendidikan
1	2	3	4
1	Matematika	3 Orang	Sarjana
2	Ekonomi	3 Orang	Sarjana
3	Fisika	2 Orang	Sarjana
4	Biologi	3 Orang	Sarjana

³ Ibid.

5	Kimia	2 Orang	Sarjana
6	Bahasa Indonesia	4 Orang	Sarjana
7	Sosiologi	1 Orang	Sarjana
8	PPKN	1 Orang	Sarjana
9	Sejarah	1 Orang	Sarjana
10	TPA	4 Orang	Sarjana
11	TBA	2 Orang	Sarjana

Table di atas maka diketahui bahwa dari jenjang keahlian guru merupakan kelengkapan dalam program pengajaran yang dituntut untuk dijalankan sebagai tugas yang telah dipercayakan sebagai amanah pemerintah sebagai pendidik, membina, membentuk anak didik, membimbing, mengarahkan dan mengajarkan untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan secara umum.

5. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon.

Untuk menjalankan roda organisasi pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah maka secara manajerial hubungan antara atasan dengan bawahan dan spesialisasi kerja dapat dilihat dari struktur organisasi dan kepemimpinan yang ada. Untuk mengetahui bidang-bidang dan tugas apa saja pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.

Melalui struktur organisasi ini, terlihat bahwa pada MAN 2 Takengon masih menggunakan sistem organisasi yang bersifat birokratis dan bukan sistem organisasi propoesional. Pada struktur organisasi yang birokratis biasanya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi meletakkan garis komando dan garis koordinasi sebagai acuan yang mengikat bagi

terselenggaranya organisasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sistem organisasi. Berbeda halnya dengan sistem organisasi profesional yang meletakkan struktur organisasi berdasarkan keahlian atau kemampuan staf organisasi.

Semua organisasi mempunyai struktur, organisasi adalah institusi atau wadah sebagai suatu unit terkoordinasi terdiri dari beberapa orang dan berfungsi mencapai satu sasaran tertentu. Melalui organisasi memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil atau mengejar tujuan yang sebelumnya tidak bisa dicapai individu-individu secara sendiri. Dalam pendekatan organisasi disebut sebagai aliran manajemen ilmiah, ditandai pembagian kerja yang tegas dengan tenaga-tenaga yang memiliki kecakapan keterampilan khusus, dan hierarki wawenang yang khas melaksanakan kewenangan tugas dan tanggung jawab organisasi.⁴

Organisasi dan kepemimpinan pendidikan, sebagai upaya pemersatu dan koordinasi, sedangkan operasionalnya diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan atau pemerintah. Jadi organisasi merupakan kesatuan sosial atau pengelompokan manusia yang tersusun atas beberapa orang, berfungsi pada dasar yang relatif terus-menerus yang dibentuk secara sengaja dan adanya ikatan untuk tujuan-tujuan tertentu yang terkoordinir secara sadar sehingga memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai perorangan.⁵

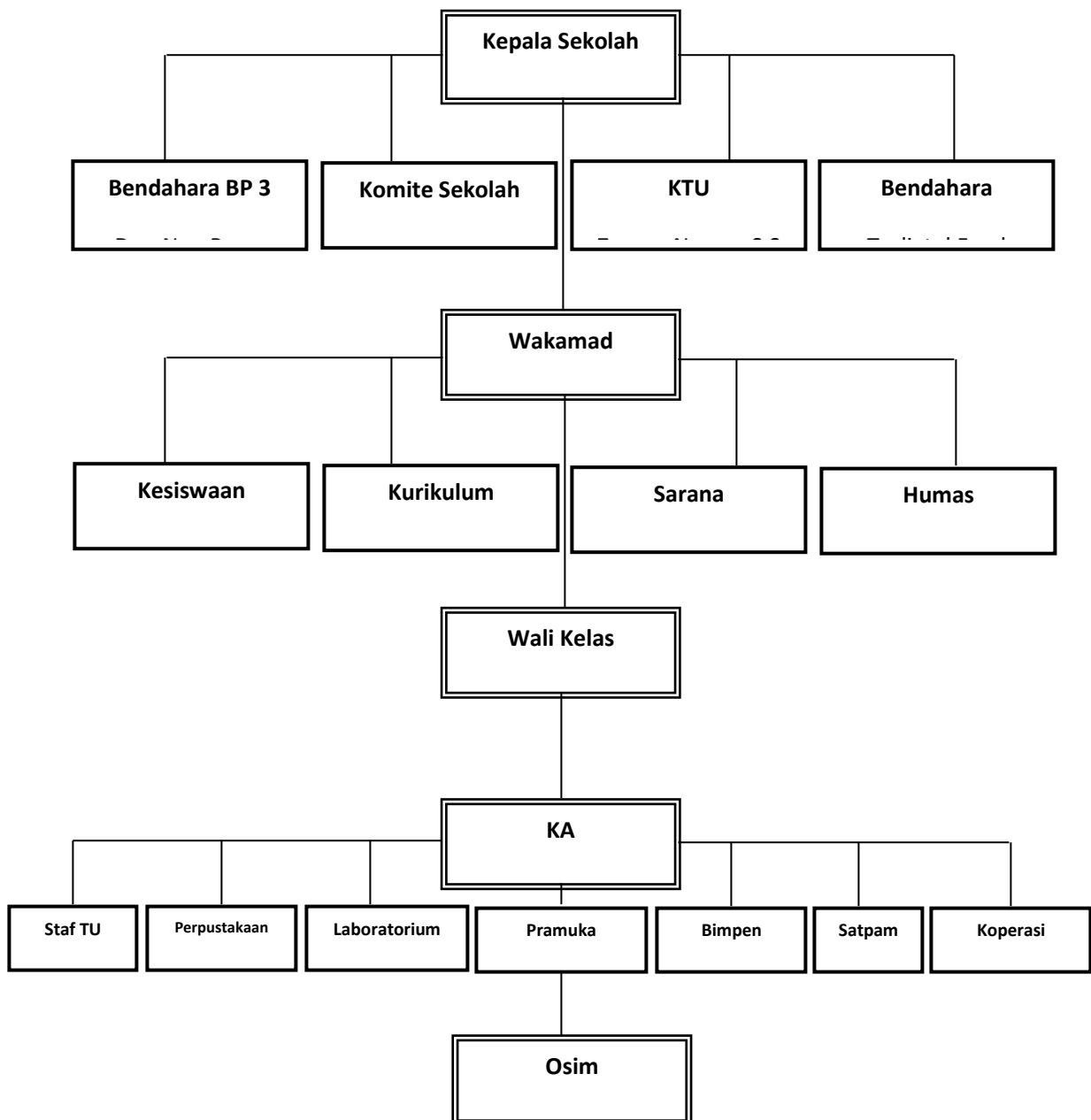
Dalam organisasi tidak terlepas kaitan dengan manajemen, untuk mencapai tujuannya, keterlibatan seluruh anggota dalam struktur organisasi di atas sangat dibutuhkan, adanya pembagian dalam tugas, punya wewenang dan tanggung jawab, komunikasi yang merupakan bentuk yang disusun

⁴ Etzioni A, *Organisasi-Organisasi Modern* (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1985), h. 29.

⁵ Engkoswara, *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah* (Bandung: Yayasan Amal Keluarga, 2001), h. 44.

direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu. Dalam hal ini organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari unit-unit sosial, kelompok orang yang mengemban berbagai tugas dan koordinasi untuk memiliki kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. , ini dapat diperhatikan melalui sturktur organisasi di bawah ini.

Gambar 4. Struktur Ogranisasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah



Dari struktural di atas disimpulkan bahwa organisasi mempunyai lima unsur: (1) adanya struktur yang menggambarkan garis komando dan garis staf sebagai garis otoritas gagasan-gagasan, (2) adanya pembagian kerja yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi, (3) adanya koordinasi mensingkronkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan (4) adanya skala yang menggambarkan hierarki hubungan antara atasan dengan bawahan (5) adanya fungsional yaitu perbedaan tugas dan tanggung jawab pada setiap individu dalam organisasi.

Dari telaah dokumentasi, dapat dijelaskan daftar guru/stap yang mengemban tugas khusus pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah. Susunan selain yang tertera dalam struktur masih terdapat sub bagian yang menjadi tanggung jawab guru-guru yang ditugaskan sebagai wali kelas di bawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi wali kelas dari kelas satu sampai kelas tiga pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.

JENJANG K ELAS	PROGRAM/JURUSAN	WALI KELAS
-Kelas I. 1	—	Fadli Efendi. S.Pd.I

- Kelas I. 2	—	Ida Fitriani. S.Pd
- Kelas I. 3	—	Raihan. S.Pd
- Kelas I. 4	—	Ihasan. S.Pd
- Kelas I. 5	—	Dra. Nasrah
- Kalas II.	IPA. 1	Busra. S.Pd.I
- Kelas II.	IPA 2	Ria Ariawati. S.Pd
- Kelas II.	IPS. 1	Maikarni
- Kelas II.	IPS. 2	Syamsuduha. S.Ag
- Kelas II.	IPS. 3	Elpidawati. S.S.P
- Kelas III.	IPA.1	Naidah. S.Pd
- Kelas III.	IPA. 2	Alpina. S.Pd
- Kelas III.	IPS. 1	Nirmawti. S.Pd
- Kelas III.	IPS. 2	Hilaili.F. A.Md
- Kelas III.	IPS. 3	Liana.B. S.Pd

Sebagai gambaran tentang program kerja sebagai wali kelas Pada MAN 2 Takengon Aceh Tengah, berikut di diskripsi tugas kerja pada masing-masing bidang kerja wakil kepala sekolah yang penulis peroleh dari rumusan program kerja MAN 2 Takengon Aceh Tengah sebagai beriku:

a. Kepala Sekolah.

Dalam struktur organisasi ini, kepala sekolah sebagai top menajer dapat memberi kontribusi kepada porsonil organisasi terutama dalam

pengambilan keputusan, baik secara komando maupun koordinasi, untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, kepala sekolah bertindak sebagai administrator dan sekaligus sebagai supervisor.

Sebagai administrator, kepala sekolah melaksanakan fungsinya dalam hal perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengawasan, pengarahan, pelaporan, pembiayaan dan evaluasi, meskipun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Sebagai supervisor, kepala sekolah melaksanakan tugasnya mengawasi kinerja guru dan staf seperti menyiapkan administrasi pembelajaran dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa dan para pegawai di sekolah

Kualitas dalam satu organisasi sangat ditentukan oleh mutu kepemimpinan dan manajemen yang efektif, dukungan dari bawah hanya akan muncul secara berkelanjutan ketika pemimpinnya benar-benar berkualitas atau unggul. Intinya kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau melakukan pekerjaan dengan sukarela dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, dalam kepemimpinan terdapat unsur pemimpin (*leader*), anggota (*followers*), dan situasi (*situation*) tertentu.⁶

Kepala sekolah menjalankan kepemimpinan manajerial karena di sekolah ada sejumlah personil yang berintraksi dengan kepala sekolah dalam menjalankan tugas-tugas sekolah. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, pegawai administrasi, pembantu umum, dan ada pula dewan sekolah sebagai gabungan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan dengan Komite Sekolah. Dewan sekolah sebagai perangkat organisasi yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan mitra bagi kantor pendidikan.

⁶ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 50.

Kepemimpinan kepala sekolah harus bersikap kreatif dan proaktif terhadap tuntutan perubahan efektif dan berorientasi pada perbaikan mutu berkelanjutan. Di samping melakukan program perbaikan mutu pembelajaran, pengubahan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah dan peningkatan kepemimpinan, maka di dalamnya juga ada perbaikan struktur untuk menjamin efektivitas perilaku organisasi melalui pembagian tugas dan tanggung jawab personal.

Kepala sekolah adalah orang yang sangat penting dalam sistem sekolah. Harus mengusahakan, memelihara aturan dan disiplin, menyediakan barang-barang yang diperlukan, melaksanakan dan meningkatkan program sekolah, serta memilih dan mengembangkan pegawai/personil. Kepala sekolah harus dapat memahami semua situasi yang ada di sekolah, dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan aturan di sekolah

Fungsi kepemimpinan adalah menangani mutu pembelajaran dan mendukung para staf yang berusaha mencapainya. Untuk itu para guru perlu diberdayakan agar mereka dapat memberikan kreativitas dan inisiatif untuk meraih mutu. Pemimpin pendidikan yang benar harus memiliki visi, sebab dengan memiliki visi maka pemimpin dapat menentukan arah bagi tujuan yang akan dicapai.

Adapun bidang tugas-tugas sesuai struktur bagi kepala sekolah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab umum manajemen sekolah.
2. Menyusun rancangan anggaran pembelajaran sekolah (RAPBS).
3. Penanggung jawab program belajar mengajar.
4. Bertanggung jawab dalam hubungan keluar dalam semua tindakan sekolah.

5. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program sekolah kepada dewan sekolah dan pemerintah.⁷

Kepemimpinan kepala sekolah mengukur keberhasilannya dari keberhasilan semua anggota dalam organisasi dan tanggung jawab penuh yang jelas, berbagi kesemua unsur dalam organisasi. Keseluruhan anggota organisasi sekolah memiliki visi tentang masa depan yang sama, memahami program mutu dan tugas-tugasnya. Setiap anggota didorong untuk terbuka, kreatif dan inovatif sehingga memungkinkan mencapai visi dalam sistem yang luas.

b. Guru kelas.

Kepala sekolah menentukan jabatan guru kelas yang ditetapkan sebagai tugas utamanya adalah guru kelas harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembelajaran juga bertanggung jawab pula untuk membenahi kelas, mendidik siswa, membimbing, mengarahkan, mengayomi dan melaksanakan segala yang telah ditentukan dalam peraturan dan ketentuan sekolah. yang menjadi kewajibannya juga menyusun perangkat kelas dan laporannya diserahkan kepada kepala sekolah.

Dalam pembelajaran, setiap guru wajib hadir di kelas sesuai jadwal, dan mengajar berpegang pada satpel dan rempal yang telah dibuat dengan mengurutkan bahan pengajaran secara sistimatis menggunakan variasi metode guru aktif dan siswa aktif baik menggunakan variasi pendekatan klasikal, kelompok, dan individual, mengajar dengan memberikan latihan-latihan aplikasi, yang bertanya dan meminta bantu mengatasi kesulitan pelajaran, yang dipenuhi juga selain variasi media atau alat bantu belajar yang sesuai berpegang pada buku utama yang dimiliki atau dapat dibaca oleh siswa, guru menciptakan suasana kelas aktif yang akrab dan bersahabat terbuka bagi siswa, guru menjadikan dirinya sebagai teman bagi siswa dalam

⁷ *Ibid.*

memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah.

Guru memberikan dukungan berbagai bentuk motivasi agar siswa lebih bersemangat belajar, dan guru memberikan penilaian dapat menyerap pelajaran umpan balik pada pekerjaan siswa, karena kita ketahui bahwa guru merupakan contoh yang ditiru bagi siswa dan siswinya.⁸ memberikan contoh perilaku *uswatun hasanah* pada kehidupan.

c. Siswa.

Pada dasarnya hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban peserta didik. Yang menjadi hak peserta didik adalah wajib menerima pengajaran, bimbingan atau arahan, menghormati guru dan mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah, sebagai mana mestinya yang bermanfaat untuk menjadi siswa yang berakhlak mulia berbakti kepada orang tua, masyarakat, juga kepada nusa dan bangsa yang professional menjunjung tinggi nilai-nilai moral kebangsaan Indonesia. Mewujudkan sebuah ide pelatihan yang membudayakan siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya baik di sekolah, masyarakat dan keluarga..

Kinerja siswa wajib hadir dalam setiap mata pelajaran di kelas, siswa memiliki buku sumber utama dan tambahan, siswa mengikuti pelajaran dengan penuh konsentrasi dan kesungguhan dan menjawab setiap pelajaran yang ditanyakan guru, juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Siswa bekerjasama dalam segala bentuk kegiatan dan tugas-tugas belajar kelompok dan lainnya.

c. Tata usaha

⁸ Nana Syaodih, *et al.*, *Pengendalian Mutu*, h. 8.

Pada prinsipnya tata usaha merupakan ujung tombak terlaksananya kegiatan administrasi dan pendidikan di sekolah. Karena untuk menjalankan yang menyangkut manajemen sekolah atau pendidikan tidak terlepas dari kesiapan administrasinya yang dijalankan dan dideokumentasikan oleh tata usaha yang bertanggung jawab penuh atas segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, kepegawaian dan siswa.

Adapun bidang tugas Tata Usaha (TU) yang berdasarkan struktur sekolah sebagai berikut:

1. Menata surat-menyurat.
2. Mengelola administrasi pengajaran.
3. Mengelola administrasi siswa.
4. Menyusun laporan-laporan.
5. Menata situasi sekolah.
6. Mengelola registrasi material sekolah.⁹

Hal ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan fungsi dan jabatannya secara akuntabilitas dari segala sisi untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan segala dokumentasi, sebagai inventaris baik bangunan dan barang yang ada pada Madrasah yang diperlukan setiap saat oleh kepala sekolah, guru, siswa juga Komite Sekolah. Di tujukan kepada ketua dan staf tata usaha TU Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon yang berjumlah lima orang staf.

B.Temuan Khusus Penelitian.

- 1. Pelaksanaan Aktivitas Komite Sekolah dalam membuat kebijakan peningkatkan Mutu Pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon.**

⁹ Syafaruddin, *Manajemen Mutu*, h. 55.

Kebijakan proses rasional menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal mengenai pemecahan-pemecahan potensial masalah kebijakan, sedangkan analisis kebijakan adalah bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan membuat kebijakan dan keputusan yang bersifat empiris, evaluatif dan normative pengetahuan mengenai apakah (fakta), mana yang benar (nilai), apa yang harus dilakukan (tindakan) memerlukan penggunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan informasi masalah, alternative, tindakan dan hasil guna kebijakan.¹⁰

Kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan pelaksanaan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik berupa pengelolaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, perencanaan pengawasan, mengkoordinasi usaha, maupun kepemimpinan secara umum.

Secara empirik fokus kebijakan dan sasaran pendidikan pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota dipusatkan pada kegiatan sesuai ruang lingkup program kerja dan implementasinya oleh satuan unit organisasi dengan memadukan struktur organisasi atas visi formal dengan informal dan konsistensi budaya kerja dengan visi yang menjadi sasaran dan kebijakan. Secara konseptual tampak kedudukan Dinas Pendidikan berfungsi sebagai fasilitator dan sebagai sumber dana dari kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di luar sekolah. Tetapi sasaran kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota adalah satuan pendidikan.¹¹

Secara konsepsional sebenarnya tuntutan kebijakan tidak boleh dikacaukan dengan tuntutan emosional, program yang bersifat ideologis, atau aktivisme politik sederhana, karena inti kegiatan organisasi antara lain adalah

¹⁰ Syaiful Sagala, *Desain Organisasi Pendidikan dalam Implementasi Kebijakan otonomi Daerah* (Jakarta: Uhamka Press, 2007), h. 209.

¹¹ *Ibid.*, h. 160

mengambil kebijakan yang telah dianalisis dan menyajikan informasi sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakukanya untuk memecahkan masalah.

Komite Sekolah dalam struktur organisasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah, dapat dilihat keterkaitan antara Komite Sekolah dan kepala sekolah meskipun hanya sebatas koordinasi. Dari hasil analisis dokumentasi Madrasah, kerjasama Komite Sekolah dengan kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja di Madrasah ini seperti: (1) memperbaiki (merehab) atau membangun fasilitas sekolah, (2) mengadakan less ekstrakurikuler bagi peserta didik terutama bagi kelas tiga, (3) menjalin hubungan dengan masyarakat untuk mendukung program pendidikan sekolah dan penggalang dana, yang sepenuhnya diserahkan kepada Komite Sekolah atas persetujuan kepala sekolah yang memengang prinsip dasar analisis kebutuhan dari pihak sekolah.

Peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Badan tersebut juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Juga Komite Sekolah berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat pada pendidikan.

Komite Sekolah memiliki fungsi yang mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan tersebut juga melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri juga

pemerintahan, yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Posisi Komite Sekolah di satuan pendidikan dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembentukan Komite Sekolah bertujuan yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan, (b) meningkatkan tanggung jawab peran serta aktif dari suatu lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, (c) menciptakan suasana yang kondusif, transparan, akuntabel dan demokratis untuk penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Pelaksanaan Peran dan fungsi Komite Sekolah dijabarkan secara rinci ke dalam kegiatan operasional yang akan dilakukan oleh Komite Sekolah dalam program dan manajemen pendidikan dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5: Penjabaran kegiatan pelaksanaan peran dan fungsi Komite Sekolah dalam kegiatan operasional Komite Sekolah.

No	Peran KS	Fungsi KS	Kegiatan Operasional Komite Sekolah
1	Pemberian pertimbangan (advokasi)	1.1 Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan yaitu: (a) kebijakan dan program pendidikan, (b)	1.1.1 Mengadakan pendataan kondisi social ekonomi keluarga serta peserta didik dan sumberdaya pendidikan dalam masyarakat. 1.1.2 Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian

		<p>RAPBS, (c) kriteria kinerja satuan pendidikan, (d) kriteria tenaga kependidikan, (e) criteria fasilitas pendidikan,(f) dan hal-hal yang dianggap penting.</p>	<p>masukan, pertimbangan atau rekomendasi kepada sekolah.</p> <p>1.1.3 Menyampaikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dengan tembusan kepada dinas pendidikan dan dewan pendidikan.</p> <p>1.1.4 Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan local.</p> <p>1.1.5 Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang menyenangkan (PAKEM).</p> <p>1.1.6 Memberikan masukan dan pertimbangan visi, misi, tujuan kebijakan dan kegiatan sekolah.</p>
2	Pendukung (supporting)	<p>2.1 Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.</p>	<p>2.1.1 Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan isidental dengan orang tua dan anggota masyarakat.</p> <p>2.1.2 Mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.</p> <p>2.1.3 Menghimbau dan mengadakan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat yang dipandang</p>

			<p>mampu untuk dapat menjadi nara sumber dalam kegiatan intra kurikuler bagi peserta didik.</p> <p>2.1.4 Memberi dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anak-anak</p> <p>2.1.5 Memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebaran narkoba di sekolah.</p> <p>2.1.6 Memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.</p> <p>2.2.1 Memverifikasikan RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah.</p> <p>2.2.2 Memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno Komite Sekolah.</p> <p>2.2.3 Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>2.2.4 Membantu sekolah dalam rangka pengalangan dana masyarakat untuk pengumpulan dana abadi.</p> <p>2.3.1 Melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa.</p>
		2.2 Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan	

		<p>2.3 Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu</p>	<p>2.3.2 Mengadakan kegiatan inopatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, penggunaan hiburan untuk sekolah dan masyarakat.</p> <p>2.3.3 Membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerja sama antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat.</p>
3	Pengontrol (controlling)	<p>3.1 Melakukan eveluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan</p>	<p>3.1.1 Mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidental dengan kepala sekolah dan dewan guru.</p> <p>3.1.2 Sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah, atau dengan dewan guru di sekolah.</p> <p>3.1.3 Meminta penjelasan kepada kepala sekolah tentang hhasil belajar siswa.</p> <p>3.1.4 Bekerjasama dengan dalam kegiatan penelusuran alumni.</p>
4	Mediator	<p>4.1 Melakukan kerja sama dengan</p>	<p>4.1.1 Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis</p>

		<p>masyarakat.</p> <p>4.2 Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat</p>	<p>dengan seluruh <i>stakeholder</i> pendidikan.</p> <p>4.1.2 Mengadakan penjangkauan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah.</p> <p>4.1.3 Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat.</p> <p>4.1.4 Menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang hasil pengamatan terhadap sekolah.¹²</p>
--	--	---	---

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikdasmen, *Acuan Oprasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah* (2004)

Penjabaran kegiatan dari table di atas yang menjadi sistem desentralisasi Komite Sekolah yaitu implementasi kebijakan pelaksanaan meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah sebagai bagian mengoptimalkan peran serta masyarakat dan menjalankan tugas yang telah di percayakan, menjalankan manajemen sekolah, mengerahkan dan memberdayakan orang tua murid untuk bekerja sama yang lebih baik, dalam mengemban tanggung jawab dari masyarakat untuk kemajuan pendidikan,

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikdasmen, *Acuan Oprasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 31-37.

membangun sikap bijaksana dalam menangani segala permasalahan sekolah, dan dapat mewujudkan pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat.

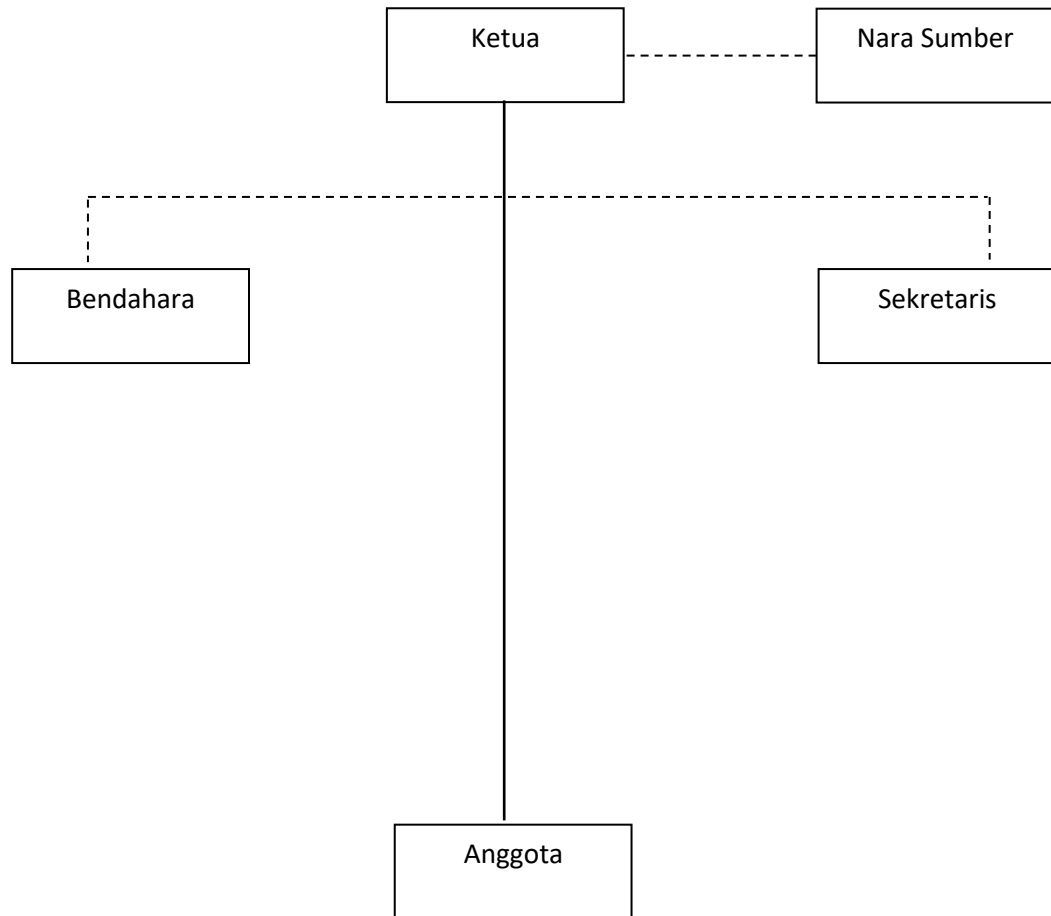
Maka sebelum lahirnya sebuah kebijakan dari Komite Sekolah, sebelumnya panitia mempersiapkan pembentukan struktur Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu:

1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat tentang Komite Sekolah.
2. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan masyarakat.
3. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
4. Mengumumkan calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
5. Menyusun nama-nama anggota terpilih.
6. Mempasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah.
7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala Satuan Pendidikan.
8. Menetapkan nama pengurus yang terpilih sebagai ketua Komite Sekolah, sekretaris Komite, bendahara komite dan anggota yang telah ditetapkan.
9. Menjalankan tugas dan peraturan yang telah disepakati bersama berdasarkan musyawarah dari semua pihak.

Dapat dilihat rincian dalam struktur Komite Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanengon Aceh Tengah pada tabel berikut di bawah ini:

Gambar 5.

Struktur Organisasi Komite Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon



Hubungan koordinatif

Hubungan instruktif

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan Satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, Pemerhati Pendidikan, Masyarakat, atau institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, yaitu: kepala seksi Mapenda Departemen Agama, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) atau

dengan Komite-Komite Sekolah lain pada satuan pendidikan lain yang bersifat koordinatif.

Pelibatan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon ini, terangkum dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Sampai saat ini pelibatan Komite Sekolah dalam kaitan kinerja manajerial sekolah belum berlangsung secara optimal, hal ini terlihat bahwa pihak sekolah hanya melibatkan Komite Sekolah dalam hal penyelenggaraan keuangan dan pembiayaan, pengadaan sarana dan prasarana sekolah saja. Kedua bidang manajerial itu sendiri pelaksanaannya hanya sewaktu ada bantuan ke sekolah”¹³

Dalam waktu bersamaan wawancara dengan Komite Sekolah bapak Surapati, S.ag menjelaskan keterlibatan Komite dengan kinerja peningkatan mutu pendidikan.

“Kalau ditanya keterlibatan Komite Sekolah dalam kaitan peningkatan kerja sekolah berdasarkan pengalaman yang dirasakan selama ini hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan realisasi bantuan biaya untuk siswa, pengadaan sarana dan prasarana di sekolah, selebihnya tidak pernah dilibatkan oleh sekolah”¹⁴

Melalui pernyataan di atas, segala yang diprogramkan ditugaskan yang seharusnya dijalankan belum terlaksana sebagai mana mestinya, karena tidak adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Sebab sekolah menangani sendiri segala aspek yang menyangkut dengan kebutuhan

¹³ Hasil wawancara antara peneliti dengan bapak , Surapati, S.Ag, sebagai Ketua Komite Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah, pada hari Rabu Tanggal 3 September 2008, jam 13' 30 samapai jam 16.00. Wib dikediman Ketua Komite Sekolah bertempat di Desa Wih Nareh Takengon Kecamatan Pengasing Kabupaten Aceh Tengah.

¹⁴ Hasil wawancara bapak Surapati, S.Ag

sekolah itu sendiri. Setidaknya sekolah melibatkan Komite Sekolah dalam berbagai bidang yang menyangkut dengan pendidikan.

Dengan demikian perlu adanya bantuan yang bersifat kongkrit dari kedua belah pihak baik sekolah dan Komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan diantaranya:

1. Masyarakat ikut serta mengaktualisasikan seluruh program-program yang akan direalisasikan oleh sekolah, dan masyarakat sebagai penyeimbang keberhasilan kualitas siswa senantiasa untuk tetap mengawasi serta mendukung program sekolah/Madrasah.
2. Adanya kerja sama pihak sekolah, Komite Sekolah, Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan, Pemerhati pendidikan, dan instansi-instansi terkait lainnya seperti Departemen Agama Daerah maupun Pusat, juga Majelis Pendidikan Daerah ikut berperan sebagai pemantau perkembangan pendidikan.
3. Mengadakan pertemuan silaturahmi terhadap Komite Sekolah bertujuan untuk membuat evaluasi seluruh program-program sekolah yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan.
4. Melaksanakan rapat dewan guru secara bersama-sama dengan utusan organisasi siswa sekolah untuk membicarakan konsep dan strategi yang dapat ditingkatkan dalam kualitas pendidikan dan disiplin siswa di lingkungan sekolah.
5. Melaksanakan try out (evaluasi belajar), remedial, kegiatan ini pihak struktur Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon bekerja sama dengan dinas pendidikan Kabupaten. Supaya tujuan kegiatan dan kejujuran terhadap mutu bidang studi antara guru dan siswa dapat terjaga dengan baik.

Berkaitan dengan kinerja Komite Sekolah tergambar pada kutipan hasil wawancara dengan kapala tata usaha TU Madrasah sebagai berikut:

“kinerja yang ditunjukkan Komite Sekolah berdasarkan hemat saya belum maksimal, hal ini mengingat pihak sekolah sendiri belum

sepenuhnya melakukan pelibatan Komite Sekolah dalam setiap kebijakan yang diambil sekolah seperti penyelenggaraan program pengajaran, kesiswaan, penentuan tenaga kependidikan, keuangan atau pembiayaan dan lain sebagainya. Akibatnya kegiatan Komite hanya sekedar terlibat pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, semisal realisasi bantuan di sekolah dan lainnya”¹⁵

Penjelasan selanjutnya dari hasil wawancara dengan bapak Zanuar Novara S.S, tentang bentuk kegiatan yang dilakukan Komite Sekolah yang belum sepenuhnya terlaksana, seperti yang diungkapkan pada wawancara berikut di bawah ini.

“Tidak sedikit dari anggota Komite Sekolah yang kerjanya hanya melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan di sekolah tanpa memberi masukan bagi kemajuan sekolah”¹⁶

Mengacu kepada hasil wawancara di atas, ditemukan bahwa kinerja yang ditunjukkan Komite Sekolah dalam skala yang umum belum menunjukkan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan dari pembentukannya di sekolah. Aktivitas yang ditunjukan hanya berkisar pada kegiatan-kegiatan tertentu saja semisal realisasi penyaluran bantuan tertentu yang diterima sekolah, selebihnya tidak menunjukan aktivitas yang berarti bagi kemajuan sekolah.

Hasil analisis penelitian ini diarahkan pada upaya menganalisis paparan penelitian untuk mengungkapkan hasil temuan penelitian di lapangan yang berpedoman kepada fokus penelitian ini. Berdasarkan pada paparan penelitian di atas, temuan pertama yang dapat dikemukakan bahwa

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Zanuar Novara, S. S, menjabat sebagai kepala Tata Usaha (TU) Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah, pada hari Kamis Tanggal 15 Januari 2009, bertempat di ruang Tata Usaha, jam 11.00. Wib di MAN 2 Takengon Aceh Tengah.

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Zanuar Novara, S.S

pembentukan pengurus Komite Sekolah dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan sekolah sebagai fasilitator pertemuan.

Menjadikan musyawarah sebagai salah satu strategi dalam kaitan pelaksanaan tugas Komite Sekolah. Sesungguhnya bermanfaat guna membentuk sikap mengerti atas segala sesuatu yang harus mereka kerjakan, di samping itu keterbukaan atau musyawarah dapat dipandang sebagai mewujudkan nilai-nilai demokratis dengan memunculkan kesadaran, bahwa untuk memengang dan melaksanakan tugas-tugas hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu, bukan untuk saling menyalahkan antar pihak satu dengan pihak yang lainnya dan tidak peduli dengan hal yang banyak, maka tidak akan terlaksana suatu program tanpa melibatkan semua yang terkait dalam mencapai kesempurnaan.

Berdemokrasi bukan hanya sekedar menyangkut suatu bentuk pemerintahan, melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan landasan sebagai berikut: (1) suatu visi dan kode etik secara formal dalam hukum dan undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua warga, sistem hukumnya bersifat objektif dan mandiri, (2) suatu sistem pemerintah yang didasarkan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, (3) struktur sosial, ekonomi, politik yang menjauhi monopoli dan memungkinkan terjadinya mobilitas yang tinggi dan kesempatan yang adil bagi semua warga, (4) adanya kebebasan berpendapat sebagai mekanisme agar ide-ide warga masyarakat terserap oleh pemerintah dan adanya kebebasan menentukan kehendak.

Tujuan yang hendak dicapai, mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah, memberikan penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah, menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua atau wali siswa dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik,

membangun kesan positif memelihara kepercayaan terhadap sekolah, sekolah sebagai jasa lembaga pendidikan memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan (siswa, keluarga, masyarakat lain), supaya kreatifitas menggaling dana pendidikan alternative bentuk kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya.

Selanjutnya setelah terbentuknya Komite Sekolah diharapkan mampu menjadi cerminan bentuk perwujudan konsistensi masyarakat dan sekolah untuk membangun kepercayaan sebagai landasan program dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan sebagai publik eksternal sekolah merupakan hal yang dianggap penting. Indikator keberhasilan pelaksanaan tugas untuk peningkatan mutu pendidikan.

2. Efektivitas Program Kerja Sekolah dan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Implementasi program kerja sekolah MAN 2 Takengon Aceh Tengah, dilaksanakan dengan beberapa fungsi-fungsi manajerial sekolah, yang menjadi bidang garapan program kerja sekolah adalah: (1) kesiswaan, (2) kurikulum, (3) sarana / prasarana, dan (4) kemitraan sekolah dengan masyarakat. Maka kepala sekolah sebagai koordinator didukung oleh guru yang telah diberi tugas khusus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti: (1) pengalaman kerja sebagai guru, (2) kinerja guru, seperti disiplin, loyalitas dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas selain mengajar, (3) pengalaman mengikuti pelatihan-pelatihan pernah mengikuti penataran, seminar dan lain-lain. Penunjukan beberapa orang guru untuk melaksanakan tugas khusus ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang susunan porsonel (guru) yang diberi tugas khusus. Melalui pola seperti ini, diakui oleh para guru memberikan dasar hukum yang jelas, sehingga dapat melaksanakan tugasnya para guru memiliki kewenangan yang jelas.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah terungkap bahwa rumusan program kerja sekolah dapat terlaksana, kepala sekolah mengungkapkan:

“saya menyadari bahwa untuk mencapai mutu pendidikan secara berkelanjutan perlu didasarkan pada perencanaan, dan perencanaan tersebut dituangkan dalam program kerja tahunan sekolah yang disusun secara matang dan sistematis yang merujuk pada rumusn visi dan misi sekolah”¹⁷

Menurut pemahaman kepala sekolah, pembuatan program kerja sekolah dimaksudkan untuk membuat suatu perencanaan yang baik, terinci dan sistimatis agar mudah dimengerti berdasarkan data-data pengalaman yang terjadi pada tahun pelajaran sebelumnya sebagai bahan penyempurnaan untuk menghadapi tahun pelajaran yang akan dimasuki atau akan dilaksanakan. Secara rinci kepala sekolah menjelaskan tentang tujuan dibuatnya program kerja sekolah yakni sebagai berikut: (1) melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku, (2) menyempurnakan program kerja sebelumnya, (3) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan persekolahan, baik urusan kurikulum, kesiswaan, humas, sarana prasarana maupun urusan administrasi sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari rumusan program kerja sekolah tersebut, secara konseptual dan praktis kepala sekolah mengupayakan untuk menjabarkan yang terkandung dalam visi dan misi sekolah.

Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam program kerja sekolah dilakukan dengan cara menugaskan kepada masing-masing wakil kepala sekolah untuk merumuskan program kerja sekolah sesuai dengan bidang kerjanya. Dimana sebelumnya kepala sekolah memberikan pengarahan atau penegasan tentang maskud atau arahan tugas yang dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan harapan supaya wakil kepala sekolah dalam

¹⁷ Hasil wawancara dengan kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah bersama bapak Drs. Usman, pada hari Senin, Tanggal 8 September 2008, jam 11-12 Wib bertempat di ruang kepala sekolah MAN 2 Takengon

merumuskan program kerjanya masing-masing berangkat dari nilai-nilai strategis yang terkandung dalam rumusan program kerja. Hasil program kerja sekolah yang dibuat masing-masing wakil kepala sekolah, dikonsultasikan dengan kepala sekolah untuk kemudian selanjutnya dikomunikasikan dengan semua guru dan staf tata usaha dan pengurus Komite Sekolah.

Wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan ada beberapa trik-trik atau strategi yang harus menjadi program berjalannya sebuah kegiatan sekolah dan Komite Sekolah yang diungkapkan sebagai berikut.

“Terdapat dalam strategi yang dilakukan kepala sekolah, strategi tersebut terangkum kedalam lima strategi yaitu: (1) yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, (2) yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, (3) yang berhubungan dengan kegiatan kesiswaan, (4) yang berhubungan dengan remedial dan les tambahan, (5) yang berhubungan dengan kegiatan ekstra kurikuler”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pengalaman kepala sekolah MAN 2 Takengon Aceh Tengah, strategi yang dilaksanakannya cukup efektif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja sekolah, meskipun hal tersebut tidak luput dari kendala yang dihadapi. Tetapi kepala sekolah memandang hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar sepanjang tidak mengganggu keharmonisan hubungan antar personil sekolah.

Sementara itu, karena menyadari impementasi program kerja sekolah dalam lingkup proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh kinerja para guru, maka kepala sekolah MAN 2 Takengon Aceh Tengah memberikan perhatian khusus terhadap kinerja guru dengan mengupayakan antara lain: (1) pembinaan internal sekolah, seperti rapat sekolah dan diskusi antar guru dengan kepala sekolah secara individual, (2) penanganan kasus-kasus

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Kepala Drs Usman

tertentu, seperti memanggil guru-guru yang kurang disiplin dalam mengajar, kurang melengkapi tugas administrasi dan guru-guru yang berprestasi mata pelajaran mengalami penurunan, (3) mengembangkan prinsip-prinsip *reward* dan *punishment* terhadap kinerja para guru maupun siswa.

3. Bidang Kurikulum.

Dengan banyaknya inovasi dalam kurikulum, kepala sekolah dituntut untuk lebih responsive dan adaptif terhadap perubahan melalui re-orientasi kurikulum terutama dalam silabus dan dalam implementasinya. Kurikulum dan program pengajaran, yang dilandasai dengan adanya kemajuan zaman dan kepentingan dalam peningkatan sumber daya manusia yang merupakan tuntutan dalam era globalisasi ini sekolah dihadapkan pada masalah di mana kenyataan banyaknya inovasi yang memasuki dunia pendidikan, juga timbul kesenjangan yang mengakibatkan “kehausan pengetahuan” di satu pihak dan belum dikuasainya pengetahuan baru di pihak lain sebagai tuntutan pembaharuan tersebut.

Pembahasan mengenai kurikulum dapat dilakukann secara meluas karena ruang lingkupnya bisa meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar di dalam dan di luar sekolah dan dapat pula disederhanakan menurut keperluannya. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana pola-pola pengorganisasian kurikulum itu dilakukan, terutama dalam mempertimbangkan kedudukan kurikulum sebagai upaya untuk merencanakan kegiatan proses pembelajaran.¹⁹ Berdasarkan rumusan tersebut kurikulum tidak lagi sekedar rencana matapelajaran, melainkan usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lebih dari itu kurikulum tidak lagi terbatas pada situasi di dalam persekolahan, tetapi meliputi situasi di luar sekolah.

¹⁹ Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 108.

Program kerja bidang kurikulum di MAN 2 Takengon Aceh Tengah dikelompokkan berdasarkan semester, yakni semester I dan semester II bidang kurikulum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan.
2. Menyusun sebagai tugas guru dan jadwal pelajaran
3. Mengatur penyusunan program pengajaran (program semester, program satuan pelajaran dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum).
4. Mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler
5. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar serta pembagian rapor dan STTB.
6. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran.
7. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
8. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran
9. Mengatur mutasi siswa.
10. Melakukan supervise administrasi dan akademis.
11. Menyusun laporan.²⁰

Langkah observasi yang dilakukan penulis untuk memperoleh data yang sejalan dengan studi dokumentasi dan wawancara mengenai program kerja wakasek di bidang kurikulum. Dapat penulis peroleh data observasi bahwa secara menyeluruh yang menjadi program kerja wakasek bidang kurikulum telah terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah terpampangnya jadwal mengajar di setiap kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang wakasek serta ruang piket. Begitu juga dengan tata tertib untuk guru, berikutnya untuk siswa/i telah terpampang masing-masing kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah ruang wakasek dan ruang piket.

²⁰ Laporan Data Dokumentasi Wakasek Bidang Kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.

Adapun yang menjadi tata tertib kelas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah berikut ini:

TATA TERTIB KELAS MAN 2 TAKENGON

1. Setelah senam pagi atau kultum semua anggota kelas segera memasuki kelas masing-masing dengan tertib, teratur dan aman.
2. Membaca do'a sebelum dan sesudah selesai pelajaran terakhir, di bawah bimbingan ketua kelas dan guru.
3. Petugas menyapu/kebersihan, harus telah selesai tugasnya sebelum jam pertama dimulai dengan tugas membersihkan ruang kelas, taman areal muka dan belakang kelasnya dari sampah-sampah, menyedikan kapur, penghapus dan sebagainya.
4. Petugas pada hari tersebut lebih diberatkan menjaga kebersihan, ketertiban kelas sepanjang jam belajar/kerja, di samping dibantu oleh anggota kelas lainnya.
5. Setiap anggota kelas, dilarang membuang sampah di lantai atau dalam laci meja, tetapi dibuang pada tempat sampah yang tersedia
6. Anggota kelas berkewajiban/ bertanggung jawab atas penanaman dan pemeliharaan taman baik di muka dan di belakang kelas masing-masing.
7. Anggota kelas tidak dibenarkan keluar masuk kelas pada saat KBM berlangsung dan bila keluar harus seizin guru dan tidak lebih dari satu orang.
8. Pada saat tukar jam pelajaran, siswa tidak dibenarkan keluar kelas, tetapi tetap di dalam kelas menunggu guru berikutnya. Bila lima menit guru belum masuk, maka ketua kelas memanggilnya atau melaporkannya kepada guru piket, guna mendapat informasi kegiatan apa yang harus ditempuh selanjutnya.
9. Setelah jam pertama selesai, ketua kelas mengabsen kelasnya, dan setelah guru selesai mengajar, ketua kelas menyodorkan absent mata pelajaran untuk diisi sebagai mana mestinya oleh guru yang bersangkutan.
10. Ketua kelas mencatat siswa/i yang cabut, atau yang melanggar tata tertib dan melaporkan kepada guru piket.
11. Setelah mengabsen kelasnya, ketua kelas menulisnya di papan tulis yang terletak di depan kantor dewan guru, tentang absensi kelasnya.
12. Bila ada kunjungan sosial, karena sakit, kematian dsb, diataur sedemikian rupa sehingga KBM tidak terlalu dirugikan.
13. Semua anggota kelas dilarang mencoret-coret meja, kursi, dinding, baik di dalam maupun di luar.

14. Bila kedapat meja, kursi, pintu, rusak/pecah karena ulah siswa tersebut harus diperbaiki/diganti oleh yang bersangkutan atau menjadi tanggung jawab bersama anggota kelasnya.
15. Pada saat keluar main-main, siswa/i tidak dibenarkan berada dalam kelas.
16. Bila siswa/i terlambat masuk lima menit harus mendapat izin dari piket setelah ada rekomendasi.
17. Pada saat pulang, keadaan meja, kursi dsb tetap dalam keadaan teratur rapi dan lantai bebas dari segala bentuk sampah.²¹

Berdasarkan data dokumentasi MAN 2 Takengon Aceh Tengah, telah tertulis dalam program kerja bidang kurikulum dan kesiswaan 2008/2009 menjadi peraturan yang harus dipatuhi bagi seluruh siswa/siswi Madrasah.

Ungkapkan wakasek bidang kurikulum dalam kesempatan wawancara berikut ini.

“pada setiap rapat tahun pelajaran baru masing-masing kami menerima satu drap dalam satu map berupa kalender pendidikan, jadwal mengajar, tata tertib guru dan siswa, surat keputusan dari kepala sekolah bagi guru-guru yang telah diberi tugas tambahan, dan berkas contoh pembuatan RPP dan silabus pembelajaran”²²

Hasil observasi penelitian ini bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi program kerja wakasek bidang kurikulum, juga telah berjalan dengan baik. Kegiatan yang berhubungan dengan seni seperti marcapada, nasid, kaligrafi, dan olah raga seperti basket, bola voli dan lain-lainnya. Yang dikoordinir oleh seorang guru yang ditunjuk berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang sesuai dan diangkat berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. Les keterampilan komputer diselenggarakan setiap hari setelah jam aktif belajar kecuali pada hari Jum'at. Demikian juga untuk les

²¹ Data Dalam Laporan bulanan Tata Tertib Siswa/Siswi MAN 2 Takengon Aceh Tengah, 2008/2009.

²² Hasil wawancara dengan wakasek bidang kurikulum Ibu Dra. Zulhijjah. Pada hari, Kamis, Tanggal. 28 Agustus 2008, jam 10.00 Wib di ruang dewan guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh tengah.

tambahan mata pelajaran pengaturannya berada dibawah koordinasi wakasek bidang kurikulum. Seperti yang diungkapkan wakasek bidang kurikulum dalam wawancara berikutnya.

“walau berada dibawah koordinasi saya, biasanya guru yang bersangkutan akan terlebih dahulu mengkonsultasikannya dengan saya mengenai target kurikulum mata pelajaran yang diasuhnya, tekhnis pelaksanaannya dan kemudian baru saya menyetujuinya berdasarkan beberapa pertimbangan akademis”²³

Selanjutnya diuraikan dalam kesempatan wawancara dengan wakasek bidang kesiswaan bersama ibu Muslailati beberapa kriteria program sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.

“sementara itu dikesempatan lain, salah seorang guru mengatakan:

“Kriteria kenaikan kelas, standar kelulusan, juga pembagian rapor dan ijazah, sebagaimana program perbaikan dan pengajaran merupakan hal yang terpenting yang setiap tahun menjadi bahan rapat menjelang tahun pelajaran baru. Sedangkan strategi yang digunakan untuk mencapai standar kopentesi kelulusan adalah menyeleksi imput, meningkatkan kualitas pembelajaran baik peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan, mengevaluasi kegiatan pembelajaran setiap bulan, tengah semester, maupun semester ahir tahun”²⁴

Berjalanya kelancaran kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah penunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan yang telah diterapkan dari keseluruhan dewan guru yang mengampu mata pelejaran menurut keahlian atau jurusan yang bidangnya masing-masing berjalan dengan baik pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.

²³ Hasil wawancara dengan ibu bagian kurikulum Dra. Zulhijjah.

²⁴ Hasil wawancara dengan wakasek bidang kesiswaan Ibu Muslailati. S.Pd. pada hari, Kamis Tanggal 28 Agustus 2008. jam 1.00 Wib, di ruang kesiswaan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.

4. Bidang Sarana Dan Prasarana.

Sarana prasarana adalah manajemen sarana sekolah dan sarana bagi pembelajaran. Manajemen sarana oleh kepala sekolah ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar bagi guru, ketersediaan sumber belajar bagi siswa serta penataan ruangan-ruangan yang dimiliki pada lingkungan Madrasah. Sekolah yang sarana dan prasarananya bila ditata dengan baik maka akan tampak rapi dan indah, sarana yang ditata akan menampilkan, kenyamanan, keindahan, kemukhtahiran dan kemudahan dalam penggunaannya.

Tugas bidang sarana dan prasarana memfokuskan pada upaya oftimalisasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Berdasarkan telaah dokumentasi, dapat diidentifikasi program kerja di bidang sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan pengecatan, dan sasaran.
 - a). Bangunan yang meliputi: (1) ruang kelas, (2) ruang guru, (3) ruang praktek, (4) ruang kepala sekolah, (5) ruang TU, (6) ruang laboratorium, (7) ruang perpustakaan, (8) ruang piket, (9) ruang tamu, (10) aula, (11) mushalla, dan raung lainnya.
 - b). Perbaikan yang meliputi: (1) ruang kelas, (2) laboratorium, (3) ruang guru, (4) ruang TU dan ruang lainnya.
 - c). Perabot dan perbaikan atau pengecatan bagunan, meja dan kursi, juga papan tulis.
 - d). Peralatan perbaikan yang meliputi: (1) computer, (2) mesin tik, (3) mesin printer, (4) mesin rumput, (5) alat praktek, (6) sound system, dan alat pendukung lainnya.

Hasil observasi peneliti peroleh memberikan petunjuk bahwa yang menjadi program kerja wakasek terbagi kepada program kerja penggolongan

pekerjaan masuk dalam katagori jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Perbaikan ini dilakukan bila suatu bangunan ruangan dan alat lainnya membutuhkan perbaikan maka akan dibenahi menurut tugas para wakasek yang telah ditentukan.

2. Sarana Pendukung, dengan sasaran:

- a). Perbaikan / pemeliharaan yang meliputi: sanitasi lingkungan, taman sekolah, listrik, telepon, PDAM, dan sarana ibadah.
- b). Pengadaan sarana / perabot yang meliputi:meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru, kunci kelas, papan tulis dan perpustakaan.
- c). Peralatan yang meliputi mesin tik, computer dan papan tulis.
- d). Sarana pendukung lainnya yang meliputi: taman biologi, alat listri, sarana ibadah, sound system, pagar, papan nama, lapangan olah raga, dan peralatan olah raga.

Untuk sarana pendukung, sejauh pengamatan peneliti bahwa apa yang dimiliki MAN 2 Takengon Aceh Tengah cukup memadai. Sekolah ini memiliki sistem sanitasi lingkungan yang cukup baik, terutama karena sekolah ini tidak berada di lingkungan penduduk yang padat, tempatnya sangat strategis dan asri, sehingga untuk mengatur persoalan sanitasi tidak sesulit apabila sekolah tidak berada di tengah lingkungan yang padat penduduknya. Masalah air dan listrik pada MAN 2 Takengon sejauh pengamatan peneliti masih dalam keadaan normal.

Sekolah ini juga memiliki taman lingkungan yang layak, yang menurut ketua osis memiliki banyak fungsi, selain sebagai bentuk pemenuhan pelaksanaan prinsip 7K yang dimiliki MAN 2 Takengon yakni penghijauan, taman lingkungan, lapangan olah raga juga bermanfaat untuk tempat istirahat di bawah pepohonan sambil berdiskusi, menikmati sejuknya alam kota dingin Takengon.

Mushalla yang dimiliki MAN 2 Takengon juga tergolong cukup sederhana bisa dikatakan memadai, yang tanggung jawab pengelolaannya diserahkan kepala sekolah kepada salah seorang guru yaitu Tenggku Muhajirin S.Pd.I melalui surat keputusan resmi kepala sekolah.

Pada intinya hampir seluruh program kerja wakasek bidang sarana / prasarana dapat terlaksana dengan cukup maksimal. Dari mulai pemeliharaan setiap ruangan dan laboratorium beserta perlengkapannya, gedung sekolah, pagar, papan nama, tempat parkir, lapangan olah raga dan peralatannya, dalam berwawancara peneliti, bisa ditunjukkan oleh wakasek bagian sarana. Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki MAN 2 Takengon boleh di bilang layak untuk menunjang proses pembelajaran yang mengarah kepada proses pendidikan yang bermutu.

Untuk meneliti secara lebih rinci perihal sarana / perasarana yang dimiliki MAN 2 Takengon Aceh Tengah, berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan sesuai dengan data dan inpentaris barang sarana dan parasara yang ada pada MAN 2 Takengon Aceh Tengah terlapir sebagai berikut:

Tabel: 6. Data Sarana Dan Prasarana MAN 2 Takengon Aceh Tengah Tahun 2008/2009.

J E N I S	JUMLAH	KONDIS BAIK	KONDIS RUSAK
Kantor Kepala Sekolah	1	1	-

Kantor Wakasek	1	1	-
Kantor Tata Usaha	1	1	-
Ruang Kelas – 1	5	5	-
Ruang Kelas – II	5	5	-
Ruang Kelas – III	5	5	-
Laboratorium IPA	1	1	-
Laboratorium komputer	1	1	-
pustaka	1	1	-
Ruang BP / BK	1	1	-
Aula	1	1	-
Mushalla	1	1	-
Toilet / WC	8	5	3

Demikianlah hasil studi dokumentasi di MAN 2 Takengon Aceh Tengah tentang sarana dan prasarana yang masih layak dipakai sebagai penunjang proses belajar mengajar. Selain itu juga konsep pembenahan sarana dan prasarana sekolah harus ada kerjasama antara kepala sekolah, guru dan orang tua siswa/i, Komite Sekolah sebagai pendukung peningkatan mutu pendidikan.

5. Bidang Kesiswaan.

Manajemen kesiswaan dimulai saat siswa masuk sekolah atau awal masuk murid baru dengan melalui seleksi menurut ketentuan, rekrutmen dan pembinaan terhadap siswa serta melaksanakan layanan bimbingan dan

konseling bagi pemecahan masalah dan pengembangan karier belajar siswa/siswi.

Bidang kesiswaan merupakan tugas khusus yang dimaksudkan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang dapat memberi kontribusi kearah pengembangan potensi siswa. Dari telaah Dokumentasi dan Wawancara dengan wakasek bidang kesiswaan dan guru, dapat dirangkum beberapa program kerja bidang kesiswaan sebagai berikut:

1. Mengatur program pelaksanaan bimbingan dan konseling
2. Mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan 7K (kemanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan dan kerindangan).
3. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi kepramukaan, PMR, kelompok ilmiah remaja, UKS, patroli keamanan sekolah dan paskibra.
4. Mengatur program pesantren kilat.
5. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan.
6. Menyelenggarakan cerdas cermat, kesenian dan olah raga prestasi.
7. Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapat beasiswa²⁵

Observasi yang peneliti lakukan untuk memperoleh data yang sejalan dengan dokumentasi dan wawancara memberikan petunjuk tentang pelaksanaan program kerja wakasek bidang kesiswaan secara menyeluruh berjalan cukup baik, seperti pelaksanaan prinsip 7K, wakasek bidang kesiswaan berkoordinasi dengan bidang wakasek bidang sarana dan prasarana. Begitu juga kegiatan OSIS, UKS, PMR, dan Paskibra, sejauh pengamatan peneliti berjalan sesuai aturan.

²⁵ Hasil wawancara dengan wakasek bidang Kesiswaan. Ibu Muslailati. S.Pd. Hari Sabtu Jam 11.00. Wib, Tanggal 6 september 2008, di ruang kesiswaan MAN 2 takengon Aceh Tengah.

Selain tugas atau program bidang kesiswaan yang harus dan wajib kami jalankan kami juga mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dalam acara atau kegiatan rutin yang di adakan di Madrasah ini dalam selang beberpa bulan kemudian di agendakan atas keputusan bersama dengan kepala sekolah dan Komite Sekolah diantaranya: (1) Dana Pengambilan Izajah bulan Afril, (2) Pelaksanaan PSB (pelaksanaan siswa baru) awal juli, (3) Rapat program tentang pengayaan pada bulan Juni, (4) Tentang masalah iyuran bulanan pada bulan Agustus, (5) Tentang pembangunan sekolah pada bulan September, (6) Kusumsi pembangunan Dayah Pesantren Terpadu pada bulan Maret, (7) Pemberlakuan kredit poin terhadap pelanggaran siswa pada bulan Agustus. Dan pertemuan ini diadakan setiap tahunnya, dengan Komite Sekolah kami mengundang mengadakan pertemuan tergantung keperluan, yang jelas mengadakan pertemuan setiap ahir tahun.²⁶

Menurut keterangan wakasek bidang kesiswaan , kegiatan tahunan yang menjadi programnya, selain kegiatan di bulan Ramadhan adalah menyelenggarakan kegiatan lomba cerdas cermat dan olah raga pada hari-hari setelah berlangsungnya ujian semester. Hal ini juga didukung oleh kegiatan OSIS, kegiatan semacam itu merupakan cikal bakal untuk mencari bibit-bibit unggul agar bisa dibawa karena kompetisi di sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu sudah menjadi program sekolah MAN 2 Takengon Aceh Tengah terselenggara berkat kerjasama sekolah dan Komite Sekolah.

6. Bidang Hubungan Dengan Masyarakat.

Masyarakat merupakan mitra untuk mengembangkan sekolah. Sekolah tidak dapat maju pesat tanpa bantuan dari masyarakat. Oleh karena itu kemitraan dengan masyarakat harus terjalin. Manajemen kemitraan sekolah dengan masyarakat mengakomodasi kepentingan-kepentingan sekolah kepada masyarakat dan sebaliknya. Realisasinya dapat berupa terwujudnya

²⁶ Hasil wawancara dengan ibu bagian kesiswaan Muslailati. S.Pd.

program kemitraan dalam Komite Sekolah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah.

Program kerja hubungan masyarakat pada dasarnya membidangi hubungan sekolah dengan *stakeholder* dan hubungan sekolah dengan kelompok kerja kepala sekolah (K3S). Program kerja hubungan sekolah dengan stakeholder, meliputi:

- 1). Kekeluargaan seperti halal bilhalal dan acara darmawisata
- 2). Pertemuan sekolah dengan Komite Sekolah.
- 3). Rapat pengurus Komite Sekolah berserta orang tua siswa dan sekolah.
- 4). Pertemuan rutin dengan Komite Sekolah.
- 5). Hubungan sekolah dengan lembaga pemerintah dan swasta. Program kerja dalam menjalin hubungan dengan K3S, meliputi: (1) pencatatan sekolah, (2) data kepala sekolah, (3). Rapat kepala sekolah, (4). Penyebaran informasi kesekolah-sekolah.

Sebagaimana yang menjadi program kerja masing-masing wakasek. Maka wakasek bidang humas juga memiliki penggolongan bidang kerja yang pelaksanaannya tergolong jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Sementara itu, program kerja wakasek bidang humas yang berhubungan dengan Komite Sekolah juga berjalan baik, salah satunya adalah dapat dibuktikan dengan terealisasinya pembukaan Dayah Tepadu Nurul Islam yang didirikan pada Tahun 2000 adalah merupakan bukti kooperatifnya jalinan kerjasama yang dibangun sekolah dengan Komite Sekolah dan masyarakat.

Hal ini juga dibenarkan Kepala Sekolah MAN 2 Takengon Aceh Tengah dalam suatu kesempatan wawancara.

“Dayah Terpadu Rurul Amal dibangun atas dasar mupakat dan musyawarah antara setakeholder sekolah dan Komite Sekolah juga masyarakat dan atas peran serta pemerintah daerah dan pusat (kabupaten dan Propensi), untuk memajukan pendidikan Islam yang membentuk generasi berakhlakul kharimah, bertanggung jawab dan berpotensi dalam segala bidang keagamaan sebagai tantangan arus globalisasi, seharusnya menghasilkan output yang dapat dijamin kepastiannya. Output sekolah memang fokusnya siswa, tetapi juga memiliki kopotensi yang dipersyaratkan”²⁷

Kepala sekolah mengungkapkan bahwa yang menjadi rujukan kepala sekolah dengan para guru dan stafnya dalam merumuskan program kepala sekolah adalah: (1) visi, misi, dan target yang diharapkan serta strategi sekolah, (2). Kurikulum Nasional yang disesuaikan, (3) hasil evaluasi program kerja sekolah satu tahun sebelumnya, (4) hasil analisis kebutuhan, potensi dan tantangan yang dihadapi sekolah, (5) aspirasi orang tua siswa dan masyarakat melalui pengurus Komite Sekolah, (6) kebijakan dan program kerja pemerintah daerah (kabupaten dan propensi) tentang pendidikan²⁸

Sedangkan analisis SWOT merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal sehingga di akhir tahun pelajaran dan di awal tahun pelajaran kepala sekolah memiliki gambaran yang akurat tentang sekolah yang dikelolanya. Sementara itu dalam mengungkapkan, aspirasi orang tua, kepala sekolah menugaskan kepada wakil kepala sekolah urusan humas untuk menyelenggarakan pertemuan rutin atau pertemuan insidentil bersama dengan pengurus Komite Sekolah. Melalui pertemuan ini, sekolah memperoleh berbagai masukan, dan ide-ide membangun kearah peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah, dengan bapak Drs. Usman pada hari senin, Tanggal 25 Bulan Agustus 2008.jam 9 00 Wib bertempat ruang kepala sekolah pada MAN 2 Takengo Aceh Tengah.

²⁸ Hasil wawancara dengan kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah dengan bapak Drs. Usman hari saptu pada Tanggal 30 Agustus 2008.jam 12.00 Wib di ruang kepala sekolah pada MAN 2 Takengo Aceh Tengah.

dipimpinnya. Berbagai upaya yang dilakukan kepala sekolah beserta guru-guru MAN 2 Takengon Aceh Tengah untuk memahami berbagai kebijakan aktual dibidang pendidikan, adanya yang mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan.

Perumusan program kerja sekolah yang dilakukan di MAN 2 Takengon Aceh Tengah, didasarkan pada langkah-langkah yang telah disepakati kepala sekolah. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa di era otonomi daerah melalui program Manajemen Berbasis Sekolah memberikan pengertian bahwa sekolah memiliki wewenang yang luas dalam merumuskan program kerja sekolah. Beberapa langkah atau prosedur yang dilakukan kepala MAN 2 Takengon Aceh Tengah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan analisis kebutuhan, potensi (SDM, keuangan, sarana-prasarana sekolah), peluang dan tantangan yang dimiliki dan di hadapi sekolah.
- b. Menugaskan setiap wakasek untuk membuat program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang hasilnya kemudian dikonsultasikan kepada kepala sekolah.
- c. Mengundang guru-guru, pengurus Komite Sekolah untuk membahas draf program kerja yang telah disusun oleh kapala sekolah dan wakasek.

Sedangkan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program kerja sekolah, kepala MAN 2 Takengon Aceh Tengah melihatnya dari empat indikator sebagai berikut:

- a. Adanya penilaian dan harapan yang tertinggi dari masyarakat terhadap sekolah, minsalnya dengan ditandai dengan semakin tingginya angka pendaftaran siswa baru dalam setiap tahunnya.
- b. Proses balajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan lancar dan penuh variasi.

- c. Diperoleh berbagai prestasi akademik siswa, baik dalam skala Kabupaten maupun Propinsi atau bahkan Nasional.
- d. Terdapatnya jaminan lulusan sekolah ini untuk bersaing dan berhasil di terima pada beberapa PTN yang bermutu²⁹.

Pengelolaan kesiswaan dalam konteks proses belajar mengajar pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah dikembangkan dalam dua program, yakni program umum yang diperuntukkan bagi kelas 1 yaitu belum mengambil program studi/jurusan pilihan, dan program khusus yang diperuntukkan bagi siswa kelas II dan III, sudah adanya program studi atau jurusan yang dipilih untuk mengejar target pembelajaran yang belum terselesaikan.

C. Tantangan dan Hambatan

1. Tantangan dan Hambatan Komite Sekolah dalam Melaksanakan Tugas pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon.

Berkaitan dengan tantangan dan hambatan Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tujuannya, dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon ini, tergambar pada kutipan hasil wawancara dengan Ketua Komite Sekolah MAN 2 Takengon Aceh Tengah sebagai berikut:

“ Tantangan maupun hambatan yang utama dihadapi pihak Komite Sekolah dalam melaksanakan tugasnya adalah, belum adanya komunikasi yang terbuka yang ditujukan pihak sekolah terhadap keterlibatan Komite Sekolah, akibatnya sering terjadi gesekan yang menimbulkan rasa curiga, merasa diawasi, terlalu mencampuri dan

²⁹ hasil wawancara dengan kepala sekolah bapak Drs. Usman.

lain sebagainya, dan hal ini terjadi dikedua belah pihak baik pihak sekolah maupun Komite Sekolah itu sendiri.”³⁰

Selanjutnya dalam kesempatan yang sama Ketua Komite Sekolah mengungkapkan lebih lanjut tentang hambatan dan tantangan yang menjadi permasalahan dalam kerjasama Komite Sekolah dan Kepala Sekolah yang sering dihadapi salah satu pihak, bukan kebersamaan atau keterlibatan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah tersebut dalam wawancaranya.

“Tantangan maupun hambatan yang dihadapi Komite Sekolah menurut hemat kami selaku pengurus adalah belum bersinerginya harapan sekolah dengan Komite Sekolah, hal ini tidak jarang memunculkan perbedaan pendapat, pandangan, dan kemauan dalam penyelenggaraan program sekolah minsalnya. Berkenaan dengan kepentingan sekolah, kalau pihak sekolah merasa memerlukan kami baru kepala sekolah menyurati atau mengundang Komite Sekolah atau pengurus lainnya, kalau tidak sekolah tersebut menyelesaikan tugas Komite Sekolah itu sendiri tanpa musyawarah. Menurut hemat kami situasi ini disebabkan tempat tinggal Komite Sekolah jaraknya sangat berjauhan dengan sekolah, belum adanya koordinasi dan komunikasi berupa keterbukaan antara sekolah dan Komite Sekolah.”

Sebagaimana diungkapkan kembali oleh bapak ketua Komite Sekolah tentang hambatan yang dialami selama menjabat sebagai ketua Komite di Madrasah tersebut.

“Hambatan Komite Sekolah yang dihadapi selama ini terutama dalam kaitan melaksanakan tugas tujuan peran dan fungsinya yang

³⁰ Hasil wawancara antara peneliti dengan bapak Drs, Surapati sebagai Ketua Komite Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Kabupaten Aceh Tengah, pada hari Rabu Tanggal 3 September 2008, jam 13' 30 samapai jam 16'00 Wib dikediman Ketua Komite Sekolah bertempat di Desa Wih Nareh Takengon Kecamatan Pengasing Kabupaten Aceh Tengah.

kami rasakan adalah kurangnya perhatian terhadap fungsi dan kedudukan Komite di sekolah secara utuh, situasi ini mengarahkan kami sebagai Komite hanya bekerja berdasarkan perintah bukan kewenangan Komite, dari situasi ini tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat, rasa diawasi dari pihak sekolah itu sendiri”.

Dalam kesempatan yang sama juga Ketua Komite menguraikan, mengakui bahwa semua yang dijalankan selama ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan pemahaman akan tanggung jawab bersama.

“Kami menganggap bahwa keberadaan Komite Sekolah sampai saat ini cenderung kurang mengetahui kedudukan dan fungsinya di sekolah, belum lagi komposisi Komite yang cenderung memiliki kepedulian dan kualitas SDM yang tergolong rendah seiring latar belakang dan profesi mereka masing-masing.”³¹

Mengacu kepada hasil wawancara di atas, ditemukan bahwa tantangan maupun hambatan yang dihadapi Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya di sekolah lebih dikarenakan, tidak diikutsertakan dalam segala hal yang menjangkut tentang pendidikan dan ketidak pahaman Komite sendiri akan kedudukannya di sekolah, latar belakang dan propesi dari masing-masing anggota Komite yang kurang pahamiya akan tugas yang diembannya. Kondisi ini membawa dampak akan hubungan antara Komite Sekolah dengan sekolah, situasi yang dapat terlihat secara nyata adalah: kurang harmonis hubungan kerja yang berlangsung, terkendalanya proses komunikasi antara Komite dengan pihak sekolah, situasi ini mengakibatkan tidak bersinergisnya keinginan dan harapan dikedua belah pihak dan cenderung menimbulkan rasa curiga merasa diawasi, dan kesannya terlalu mencampuri.

³¹ Hasil wawancara dengan Komite Sekolah bapak Surapati

Adanya sikap acuh dan ketidak pedulian ini juga didukung oleh sikap enggan mereka untuk terlalu mencapuri urusan intern dari lembaga pendidikan tersebut menambah semakin besarnya jurang pemisah antara pihak sekolah sebagai pengelola pendidikan dengan masyarakat selaku pengguna *stakeholder* pada pendidikan.

Di samping hambatan-hambatan pengelolaan dana/pembiayaan sekolah sebagaimana dikemukakan di atas, faktor lain adalah masih kurang keterbukaan serta traspransi dari sekolah terhadap *stakeholder* yang terkait, sehingga pelaksanaan tugas Komite Sekolah yang seharusnya dilakukan jadi semakin tidak efektif.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah memerlukan pelaksanaan prinsip ketebukaan, demokratis, demi tercapainya hasil guna dan daya guna, cepat tanggab, partisipasi, berwawasan untuk ke depan, penegakan hukum, akuntabilitas (pertanggung jawaban), keadilan, dan profesionalisme. Bila tidak bisa kesepuluh prinsif di atas tersebut dijalankan, hanya sebahagian saja menurut keinginan masing-masing dan meninggalkan beberapa prinsif lainnya, maka akan timbul ketidak seimbangan pelayanan oleh penyelenggara dan keinginan masyarakat. Identifikasi komitmen penyelenggara pendidikan sebagai titik awal pelaksanaan fungsi Komite Sekolah sangat penting diketahui terlebih dahulu. Secara bertahab sedikit demi sedikit menyadarkan berbagai pihak terkait membangun penyelenggaraan pendidikan yang baik secara teratur, terus-menerus berkesinambungan dan sistimatis.

Masalahnya adalah sistimatika wawasan ke masa depan dalam jangka panjang dari penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan ini, belum bisa memberi dukungan fasilitas dan mediasi ke arah perubahan pola pikir dan cara bertindak sehari-hari dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat lokal.

Wawasan merupakan citra pola pikir tentang masa depan yang ingin dicapai yang lebih baik dan lebih bermanfaat apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang.

Dengan demikian akan terjadi dinamika perubahan pola pikir dan cara bertindak dari waktu ke waktu berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Tentu saja ini akan menimbulkan dialog internal di masing-masing individu penyelenggaraan pendidikan. Peran Komite Sekolah dalam menjembatani kepentingan di antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan senantiasa memerlukan kecermatan identifikasi tersebut. Ketika ada keluhan masyarakat yang masuk, ada keengganan memanfaatkannya sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Pada tingkat apa dan dengan cara bagaimana dialog publik, maka di sinilah posisi dan peran Komite Sekolah yang perlu dikenalkan manfaatnya.

Masalah lain adalah susunan pengurus Komite Sekolah akan senantiasa berubah tiap beberapa tahun secara priodik dan ini berdimensi jangka pendek. Bagaimana wawasan jangka panjang suatu proses perubahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat lokal bisa diteranspormasikan secara berkesinambungan dan konsisten oleh kepengurusan Komite Sekolah yang akan berubah dalam jangka pendek secara terus menerus.

Komposisi kepengurusan Komite Sekolah akan menentukan pola pikir dan cara bertindak dari proses perubahan ke kondisi masa depan yang diinginkan. Bisakah hasil yang dinamis dari kepengurusan Komite Sekolah dari satu dengan yang berikutnya bisa saling diikuti idenya secara berkelanjutan. Maka wawasan yang baik penjabarannya akan memberikan fokus dan petunjuk dalam bertindak, menyusun program menuju keadaan masa depan yang diinginkan.

Mengingat peran Komite Sekolah seperti digambarkan di atas, bidang garapannya lebih condong kearah evaluasi, koreksi kearah perbaikan di masa

depan. Ini berat dipahami bersama karena suatu evaluasi dan koreksi akan menyakitkan dan sulit diterima dengan lapang dada oleh sebahagian besar individu. Disarankan pada awal penerapan fungsi Komite Sekolah lebih bergerak mulai dari bidang perencanaan program dahulu untuk di jalankan dalam porsi lebih besar, dan mengarah ke evaluasi. Langkah strategis ini akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak terkait memahami manfaat suatu perubahan perbaikan dengan memperhatikan mekanisme layanan pengaduan masyarakat di masa akan datang, karena suatu rencana sangat menyenangkan, karena di situ ada harapan dan kepentingan, sedangkan keluhan masyarakat sebagai kritik, koreksi, evaluasi merupakan tolak ukur berjalannya atau tidak suatu yang diprogramkan, padahal ini masuk dalam pelayanan konsumen yang sangat penting.

Pada tingkat awal dari pelayanan konsumen ini (pengguna jasa sekolah), institusi penyelenggara pendidikan perlu mengidentipikasi konsumen di masyarakat, menentukan kehendak dan harapan konsumen, mempertemukan kehendak konsumen, mengatasi harapan konsumen, mengantisipasi kebutuhan konsumen, mempertemukan kebutuhan konsumen dalam bentuk pencapaian tingkat kepuasan masyarakat, dan pada tingkat paling atas adalah mendapatkan komitmen konsumen dalam bentuk citra penyelenggara pendidikan.

Maka dengan demikian, Komite Sekolah berhadapan dengan realitas adanya jalan yang panjang yang harus ditempuh secara bertahab. Kondisi demikian memerlukan komitmen dan dukungan fasilitas yang konsisten dan berkesinambungan.

Masing-masing pihak terkait perlu mengukur dari waktu ke waktu dan ditindaklanjuti dengan proses yang serasi pada kondisi lokalnya seperti: apa yang sudah berhasil dicapai, apa yang masih kurang, dan apa prospek ke depan dari keberadaan fungsi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan meningkatkan mutu pendidikan.

2. Upaya-Upaya Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Upaya-upaya Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah koordinasi dan kerjasama dilakukan sesungguhnya akan berimplikasi pada adanya saling bahu membahu antara satu dengan yang lain dalam melaksanakan tugas atau yang sudah di programkan dalam kinerja sekolah dan komite Sekolah. Tompson menyatakan seperti yang dikutip oleh Stoner (1991) bahwa ada tiga variasi ketergantungan antar unit kerja dalam suatu organisasi yaitu: (a) ketergantungan yang dikelompokkan yaitu apabila unit-unit organisasi tidak tergantung satu dengan yang lainnya, namun sangat tergantung pada prestasi yang memadai, (b) ketergantungan skuensial yaitu apabila suatu unit organisasi harus melaksanakan aktivitasnya terlebih dahulu sebelum unit-unit selanjutnya dapat bertindak, sedangkan, (c) ketergantungan timbal balik melibatkan hubungan timbal balik antara sejumlah unit.³²

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinir agar masing-masing dapat menghasilkan apa yang diharapkan. Koordinasi ini dipahami sebagai usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya dan dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal untuk mencapai tujuan secara keseluruhan.

Koordinasi memiliki beberapa fungsi yaitu: (1) pencegahan konflik dan kontradiksi (2) pencengahan persaingan yang tidak sehat, (3) pecegahan pemborosan, (4) pencegahan kekosongan ruang dan waktu, dan pencegahan terjadinya perbedaan pendekatan dari pelaksanaan.³³

³² Stoner, *Management* (New Jersey: Printice-Hall, 1985), h. 226.

³³ Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 56.

Pemberdayaan atau upaya-upaya Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon ini, terangkum dalam hal wawancara sebagai berikut:

“Pemberdayaan Komite Sekolah dalam pelaksanaannya terutama dalam hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan dapat dikatakan belum berlangsung sebagaimana harapan, hal ini terbukti dengan tidak berjalannya tugas maupun difungsikan Komite Sekolah secara utuh, walaupun ada keterlibatan ini lebih dikarenakan adanya bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah semisal Bantaun Oprasional Sekolah (BOS). Karena hal ini lebih difokuskan pada pengawasan dan pertanggung jawaban penyaluran bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dan bantuan lainnya”

34

Dari wawancara di atas maka dilanjutkan kembali penjelasan oleh Komite Sekolah yang menjangkut pemberdayaan Komite Sekolah sebagaimana berikut di bawah ini.

“Pemberdayaan Komite Sekolah belum berlangsung sebagaimana yang diharapkan terutama dalam kaitan peningkatan bidang Kurikulum dan program pengajaran, pembinaan guru maupun siswa, dan hubungan dengan masyarakat”³⁵

Lanjutan dari wawancara di atas mengenai upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon.

“Ada kesan akan tidak maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Sekolah terutama dalam kaitan menunjang kegiatan dan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan lebih dikarenakan adanya ketidak pahaman akan kedudukannya, sehingga hal ini

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Surapati S.Ag. sebagai Komite Sekolah MAN 2 Takengon Aceh Tengah, bertepatan pada hari Senin Tanggal 12 Pebruari 2009 10.00 Wib. Bertempat di SD Negeri 9 Takengon Aceh Tengah

³⁵ wawancara dengan salah satu dewan guru yang memegang bidang studi PPKN pada MAN 2 Takengon Aceh Tengah pada hari Senin Tanggal 12 Pebruari 2009 12.00 Wib, MAN 2 Takengon

menimbulkan permasalahan di sekolah, situasi ini lebih lanjut justru memicu ketidak harmonisan terutama dalam hal koordinasi maupun kerjasama antara sekolah dengan Komite”³⁶

Kondisi di atas disebabkan oleh beberapa faktor yakni belum dilakukannya pemberdayaan Komite Sekolah oleh pihak sekolah secara optimal yakni yang meliputi: *Pertama*, mampu membuat (*enabling*) dimana segala sumber daya diperlukan dapat diberdayakan sepenuhnya. Sumber-sumber daya itu mencakup waktu, personel, uang dan sebagainya diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. *Kedua*, memperlancar (*facilitating*) dalam kaitan ini kepala sekolah dituntut untuk meniadakan halangan, rintangan dan penundaan yang menghalangi pekerjaan sebaik-baiknya. Secara organisasional biasanya halangan dan rintangan tersebut berupa system dan prosdur. Hal ini bisa dimengerti mengingat system dan prosedur merupakan salah satu alat manajemen untuk melakukan pengendalian. Dengan demikian memperlancar berarti memperhatikan apa yang perlu dilakukan oleh orang yang diberdayakan, lalu menyediakan jalan selampang mungkin. Untuk itu diperlukan komunikasi, sehingga akan terjadi saling tukar informasi antara kepala sekolah dengan Komite Sekolah yang diberdayakan. *Ketiga* berkonsultasi (*consultating*), dalam kaitan ini diberdayakan tidak saja berkaitan dengan kegiatan sehari-hari melainkan juga menyangkut masalah-masalah strategis. Konsultasi tersebut tidak terbatas hanya pada pendapat dan gagasan saja. Bisa juga dengan menyediakan kotak saran. Melalui upaya ini akan diharapkan saling mengisi kekurangan masing-masing pihak. *Keempat*, kerjasama (*collaborating*) dimana kepala sekolah dengan Komite hendaknya melakukan kerjasama dari setiap program pemberdayaan. Hanya dengan kerjasama bebas, terbuka, dan penuh, seluruh kekayaan, kecakapan dan pengetahuan dalam organisasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kerjasama juga

³⁶ Hasil wawancara dengan kepala Tata Usaha bapak Zanuar Novara. S.S

merupakan ujian akhir yang akan membuktikan tidak hanya sebesar kecakapan menejer dalam pemberdayaan, melainkan juga seberapa kuat kemampuan melaksanakannya secara penuh. Namun hal itu tidak berarti menejer tidak mampu memulai perubahan strategis, sebab untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya mereka yang diberdayakan. Justru melalui kerjasama dapat membantu memastikan perubahan yang strategis yang dipikirkan secara lebih matang. Hal ini berarti bahwa kerjasama merupakan kecakapan yang berkembang melalui praktek. *Kelima*, membimbing (*mentoring*) merupakan tahap kegiatan pemberdayaan dan sekaligus merupakan teknik manajemen. Bertambahnya kematangan dan pengalaman akan sampai kepada kesadaran untuk mencapai lebih banyak dan memperluas pengaruh melalui kerjasama dengan masyarakat umumnya. Kepala sekolah diharapkan suka menularkan apa yang dipelajari dari pada menerapkan pengetahuan secara langsung sehingga dapat mencapai lebih banyak dengan cara ini dari pada mengerjakannya sendiri. Proses ini disebut membimbing, yaitu bertindak sebagai teladan dan pelatih bagi Komite yang diberdayakan. *Keenam*, mendukung, (*supporting*) manajer yang baik mengetahui perlunya mendukung orang yang diberdayakan dan membantu mereka untuk mandiri.

Dampak yang nyata pemberdayaan baru muncul bila para manajer melihat bahwa peran utama mereka adalah memberi dukungan yang tepat. Untuk itu diperlukan upaya memimpin dari awal dengan baik yang mengarah pada kemandirian mereka yang diberdayakan dari keseluruhannya.

Hasil wawancara dengan Kasi Mapenda Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah.

“kami ikut serta memberi dukungan kepada Komite Sekolah dalam menjalankan tugas kegiatan Komite yang diprogramkan. Dari Departemen Agama mengadakan pelatihan atau seminar kepada para Komite Sekolah umumnya Aceh Tengah yang bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Daerah (MPD), walaupun tidak ditentukan jadwalnya dalam satu tahun berap kali diadakan

pelatihannya akan tetapi kegiatan ini berlanjut diadakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Komite Sekolah”³⁷

Dalam waktu bersamaan wawancara dengan kasi MAPENDA menjelaskan bahwa yang menjangkut bantuan dan penggalangan dana, diserahkan kepada Komite Sekolah untuk mencari peluang yang seluas-luasnya sebagai pembenahan kebutuhan sekolah.

“Dalam bentuk dana kami tidak ada membantu, komite berusaha mencari dana untuk kepentingan pendidikan baik berupa financial dan sarana prasarana, dalam hal ini, kami menyarankan bermusyawarah atau bekerja sama dengan kepala sekolah setempat. Apabila tidak terlaksananya sebuah program tersebut maka Komite sekolah mencari solusi, sumbangan, arahan, tanggapan tentang prosedur kegiatan Komite Sekolah tersebut, atau terjadinya kesalah pahaman dalam menjalankan kegiatan ini. Maka kami sebagai penengah memberikan masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan atau berupa kebijakan yang disetujui bersama”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kasi Mapenda Aceh Tengah di atas disarankan, maka yang harus dilaksanakan kegiatan komite adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja tahunan dan anggaran rumah tangga.
2. Membantu pengadaan dana, sarana dan prasarana serta bantuan lainnya yang diperlukan Madrasah.
3. Membantu usaha pemantapan dalam mewujudkan terselenggaranya OSIM (Organisasi Sekolah Intra Madrasah) latihan kepemimpinan OSIM perwakilan kelas dan kegiatan ekstrakurikuler.

³⁷ Hasil wawancara dengan Kasi Mapenda Departemen Agama Takengon Kabupaten Aceh Tengah bersama bapak Drs. Amrun Saleh, pada hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2008. di Kantor Departemen Agama Aceh Tengah

³⁸ Hasil wawancara dengan Kasi MAPENDA bapak Drs. Amrun Saleh.

4. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar.
5. Memelihara hubungan dan kerja sama antara orang tua dan warga Madrasah.
6. Penempatan dana dan bantuan lainnya dari orang tua siswa dan masyarakat secara tepat sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
7. Penyusunan laporan penggunaan serta pemanfaatan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan.³⁹

Adapun upaya pemberdayaan Komite Sekolah terutama dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan sekolah belum berlangsung sebagaimana mestinya. Artinya komite belum mampu melaksanakan tugas maupun fungsinya sebagai mana diamanatkan melalui ketentuan yang berlaku. Tidak jarang justru kehadiran komite dengan berbagai dimensi latar belakang pengurusnya baik dari pendidikan maupun profesionalnya dirasakan oleh sekolah sebagai penghambat dan justru mendatangkan permasalahan bagi sekolah.

Keterlibatan Komite Sekolah dalam pelaksanaan tugas sekolah hanya pada bidang pembiayaan/keuangan sekolah serta sarana dan prasarana. Keberadaan mereka pada kedua bidang tersebut semata-mata memantau pelaksanaan dan penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah untuk siswa melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lainnya. Sementara bantuan bidang lainnya semisal bidang kurikulum dan program pengajaran, pembinaan tenaga kependidikan

³⁹ Amrun Saleh, *Peran Komite Madrasah / Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah, Seksi Penamas 2008. menjelaskan. Usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah dari peran masyarakat akan timbul reaksi pendidikan antara lain: 1) Siswa mau belajar dan senang di lingkungan sekolah, 2) Kehidupan siswa meningkat, 3) Orang tua siswa berani datang kesekolah untuk berdiskusi dengan guru dan jika mempunyai masalah, 4) Komite lebih aktif membantu sekolah, serta memantau peranan pendidikan.

sekolah, pembinaan kesiswaan dan hubungan masyarakat belum mendapat perhatian dari pihak sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan tugas Komite Sekolah dalam membuat kebijakan meningkatkan mutu pendidikan adalah: *Pertama*, Mewadahi dan

menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. *Kedua*, Meningkatkan tanggung jawab atau peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. *Ketiga*, Menciptakan suasana kondusif, transparan, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pemikiran, pendukung, pengontrol maupun tenaga dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik yang berwujud finansial dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Pelaksanaan tugas Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat baik organisasi, dunia usaha, industri juga pemerintah. Berfungsi menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
3. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Komite Sekolah. Semua yang diprogramkan sekolah, Komite tidak diikutsertakan dalam segala hal yang menyangkut tentang pendidikan, karena ketidakpahaman Komite sendiri akan tugas dan kedudukannya di sekolah, yang membawa dampak kepada kedua belah pihak. Terlihat kurang harmonisnya hubungan kerja yang berlangsung, cenderung menimbulkan rasa curiga, merasa diawasi, dan kesannya terlalu mencampuri.
4. Upaya-upaya Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah koordinasi saling kerjasama, dan komunikasi dilakukan sangat membantu pelaksanaan tugas dan tujuan yang telah diprogramkan Komite dan sekolah. Sebuah organisasi harus melaksanakan aktivitasnya dengan keterbukaan dan terkoordinir, tukar informasi melibatkan hubungan timbal balik antara sekolah dan Komite Sekolah.

B. Saran-Saran

1. Kepada Komite Sekolah Madrasah aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah khususnya, untuk dapat kiranya lebih meningkatkan peran, tugas dan tanggung jawab kepada sekolah. Komite Sekolah sebagai fasilitator untuk masyarakat atau orang tua wali murid dengan pihak sekolah. Maka Komite Sekolah harus tau fungsi yang dijalankan sebagaimana di tetapkan oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat I.
2. Komite Sekolah maupun kepala sekolah harus transparan terhadap publik terutama dalam pemberdayaan dana pembelajaran, karena Komite Sekolah dibentuk atas azas-azas tertentu yang diamanatkan masyarakat setempat. Kemudian Komite Sekolah berhak mengetahui berbagai kucuran dana demi pendidikan, kerena di era reformasi ini trasparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan.
3. Kepala sekolah MAN 2 Takengon Aceh Tengah disarankan untuk dapat lebih bersikap terbuka, mengikutsertakan Komite Sekolah dalam berbagai hal yang berhubungan dengan program pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan selain pendanaan antara lain: perencanaan, manajemen, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, tata tertib siswa dan guru. Serta lebih meningkatkan keterlibatan guru dalam merumuskan kebijakan dan program sekolah sebagai proses pemberdayaan, supaya semua kebijakan dalam pelaksanaan strategi manajemen pembiayaan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan diwujudkan melalui program yang dikembangkan bersama-sama dengan Komite Sekolah.
4. Kepada kepala sekolah agar lebih teliti dan sistimatis dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan sekolah yang telah dipercaya oleh semua pihak

organisasi sekolah. Sehingga prestasi siswa dan siswi untuk semua bidang studi khususnya bidang agama mencapai tujuan yang maksimal sesuai dengan harapan dan juga lebih diutamakan sistem praktek dari pada teori.

5. Kepada guru-guru bidang studi disarankan bertanggung jawab penuh dalam pembelajaran yang diterapkan kepada siswa baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah sebagai acuan bagi siswa/siswi dan masyarakat umumnya. Untuk tidak mudah merasa puas dengan apa yang telah dicapai saat ini, untuk pembenahan dan peningkatan prestasi kerja keras serta pemberdayaan potensi yang dimiliki secara lebih optimal merupakan langkah positif dalam rangka program peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah.
6. Kepada orang tua siswa/siswi harus mendukung program sekolah sebagai salah satu bentuk kinerja di lingkungan sekolah, tidaklah menjadi tanggung jawab sekolah itu saja akan tetapi dapat melaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Dari sini masyarakat mempunyai ide, tuntutan, partisipasi dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan sebagai perwakilan masyarakat melalui Komite Sekolah. Orang tua murid dan masyarakat sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang digunakan atau dikeluarkan.
7. Kepada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah dan kepala Seksi MAPENDA, setelah penelusuran penelitian menggarahapkan, memprioritaskan program-program pelatihan terutama dalam kaitan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang tugas, peran dan tanggung jawab Komite Sekolah guna mencapai tujuan peningkatan kinerja Komite Sekolah sebagai bagian integral dari upaya peningkatan

mutu pendidikan pada masa sekarang dan masa akan datang dan seterusnya.

8. Kepada siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Takengon Aceh Tengah. Siswa dan siswi harus mematuhi peraturan sekolah dengan kedisiplinan, dan menjadikan sekolah sebagai lumbung ilmu pengetahuan yang tidak terlepas dari visi dan misi sekolah, serta berkosentrasi dalam proses pembelajaran dalam mencari ilmu pengetahuan untuk meraih cita-cita.
9. Hasil penelitian ini yang penulis lakukan masih terkesan terbuka untuk diuji ulang kembali dengan penelitian yang mendalam dan tolak ukur yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasyidin. *Keperibadian dan Kependidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Alex MA. *Kamus Ilmiah Populer Kontenporer*. Surabaya: Karya Harapan, 2005.
- Azra, Azjumardy. *Paradigma Baru Pendidika Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara 2006.
- Ahman, Nana Syaodih Sukmadinata, Ayi Novi Jami'at. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Bogdan R.C, dan Biklen S.K. *Qualitatif Research For Educational: An Introduction To Theory and Methods*. Boston: Allyn, 1982.
- Bafadal, Ibrahim. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Etzioni A. *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Prees, 1985.
- Engkoswara. *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga, 2001.
- Fatah, Nanang. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- [http // www.smknl-CMS.sch.id/ind/ fropila. Html](http://www.smknl-CMS.sch.id/ind/fropila.html). Tanggal 10-05-2008.
- [http:// 64.203. 71. 11 // kompas-cetak / 0408 / 02 / Didaktika / 1179910. htm](http://64.203.71.11/kompas-cetak/0408/02/Didaktika/1179910.htm). Sabtu tgl,10-Mei-2008.
- Irwan dkk. *Study Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*. Jakarta: Indonesia Corruption Wath (ICW), 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

- Miles M.B, dan Huberman A.M. *“Data Management and Analysis Methodos”*
In Denzin N.K. and Lincoln Y.S. *Handbook Of Qualitative Research*.
New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Miles.M.B, dan Huberman A.M. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep
Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia: UI-Press, 1992.
- Pedoman Penulisan Proposal Tesis, Program Pascasarjan IAIN Sumatra
Utara Medan, 2004.
- Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis, Program Pascasarjana IAIN
Sumatera Utara Medan, 2006.
- Purwanto, Ngalm. *Administrasi Pendidikan*. cet. 15 Jakarta: Sumber
Widya, 1996.
- Stewart, Aileen Mitchell. *Empowering People*. London: Pitman Publishing,
1994.
- Syarifain, Khadim al asy Haramain. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Medinah
Munawwarah: Kerajaan Saudi Arabia, 2000.
- Supardi Dedi, dan Fasli Jalal. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi
Daerah*. Yogyakarta: Adicita, 2001.
- Siddik, Dja'far. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Citapustaka
Media, 2006.
- Seri Pendidikan Nasional, *Petunjuk Pelaksanaan Sistim Pendidikan
Nasional*. Jakarta: Eka Jaya, 2003.
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Stratregi
Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: Rakasta Samasta, 2000.
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*.
Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suryadi. *Dewan Pendidikan dan Komite Sekola : Mewujudkan Sekolah-
Sekolah yang Mandiri dan Otonom*. Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional, 2003.
- Sallis, Edward. *Total Quality Manajemen in Education*. London: Kogan Page
Limited, 1993.
- Syafaruddin. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press,
2005.

Syafaruddin. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Stoner. *Management* . New Jersey: Printice-Hall, 1985.

Siagian. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (DEPDIKBUD), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Tilaar, H.A.R. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, dalam Perspektif Abad 2*. Magelang: Tera Indonesia, 1999.

Tuti T. Sam M. dan Sam. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Walidin AK, Wurul. *Pencerahan Jurnal Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh, 2004.

